

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP

Tahun
2025



REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

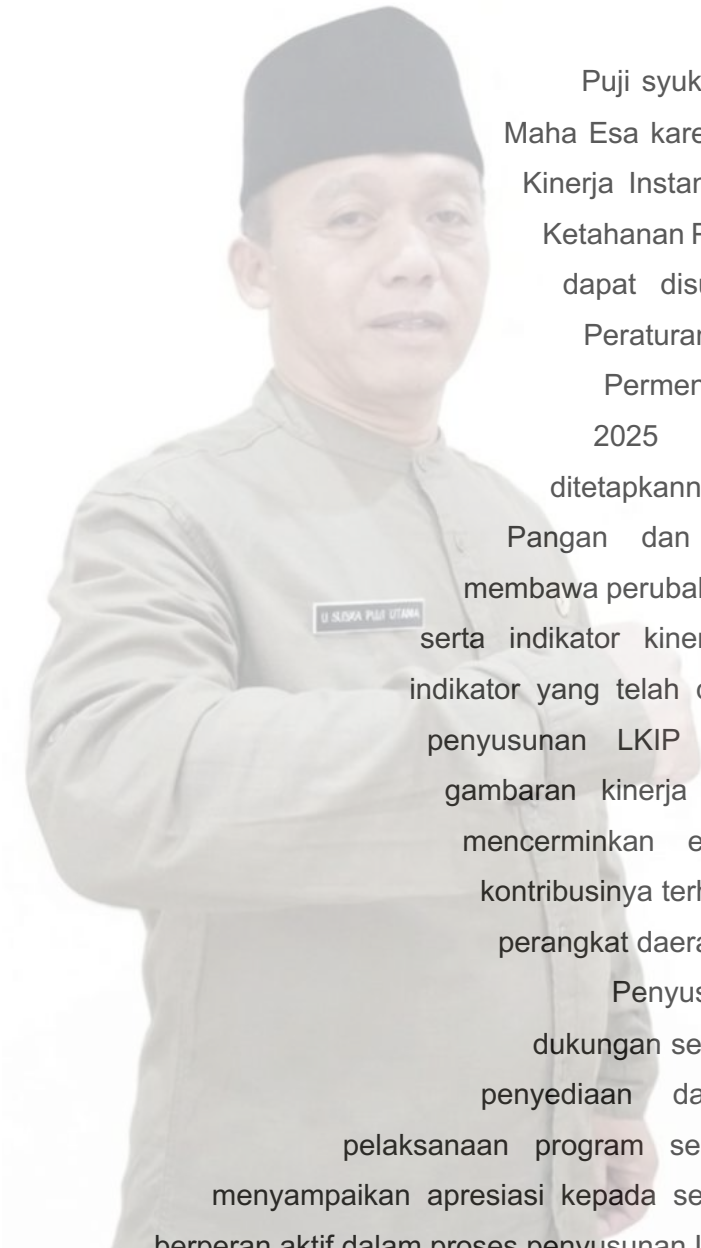


BANDUNG
LEBIH BEDAS!

DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR

A portrait of Uka Suska Puji Utama, a man wearing a black cap and a grey uniform, standing with his arms crossed. The image is semi-transparent and serves as a background for the text.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung dapat disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014. Tahun 2025 menjadi periode transisi dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025–2029, yang membawa perubahan pada struktur tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja perangkat daerah. Melalui integrasi indikator yang telah diselaraskan dengan Renstra 2025-2029, penyusunan LKIP 2025 diharapkan mampu menyajikan gambaran kinerja yang lebih terukur dan komprehensif, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan sasaran strategis perangkat daerah.

Penyusunan LKIP ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyediaan data, verifikasi capaian kinerja, dan pelaksanaan program sepanjang tahun 2025. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berperan aktif dalam proses penyusunan LKIP ini. Semoga laporan ini dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan bagi peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tahun-tahun mendatang.

Soreang, Maret 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Bandung

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Uka Suska Puji Utama', written over a blue horizontal line.

Drs. H. Uka Suska Puji Utama, M.Si
NIP. 19670914 199501 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator tujuan, yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP). Skor PPH Konsumsi terealisasi sebesar 95,78 atau tercapai 111,87% dari target, yang menunjukkan peningkatan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) terealisasi sebesar 120,90 atau tercapai 120,90% dari target, mencerminkan ketahanan usaha lebih kuat, sebab margin usaha cukup untuk menyerap fluktuasi harga input.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi belanja pada urusan wajib/rutin, urusan ketahanan pangan, serta urusan kelautan dan perikanan berturut-turut Rp14.586.023.295,00 (91,32%), Rp15.117.724.186,00 (97,13%), dan Rp9.620.533.611,00 (95,08%). Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang relatif selaras dengan pencapaian kinerja.

Namun demikian, pelaksanaan urusan ketahanan pangan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural. Preferensi budaya masyarakat terhadap beras masih menjadi kendala dalam mewujudkan komposisi konsumsi pangan yang lebih beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kontribusi pangan lokal nonberas, seperti umbi-umbian, meskipun meningkat, masih relatif terbatas akibat minimnya inovasi produk olahan, rendahnya persepsi nilai sosial, serta kurangnya promosi. Selain itu, ketimpangan pendapatan dan fluktuasi harga pangan, khususnya pangan hewani dan buah, membatasi akses sebagian masyarakat terhadap pangan bergizi secara berkelanjutan. Peningkatan Skor PPH juga masih sangat bergantung pada konsistensi program pemerintah, dukungan anggaran, serta efektivitas koordinasi lintas sektor.

Pada urusan kelautan dan perikanan, tantangan utama yang dihadapi meliputi fluktuasi kualitas dan kuantitas sumber daya air, terutama pada musim kemarau, yang berdampak langsung terhadap produktivitas usaha perikanan. Permasalahan kualitas benih ikan yang belum stabil dan rentan terhadap penyakit turut menyebabkan tingginya tingkat kematian ikan. Di sisi lain, harga pakan yang relatif tinggi dan tidak sebanding dengan harga jual ikan, serta keterbatasan ketersediaan pakan alternatif, masih menjadi faktor penekan efisiensi usaha. Di hilir, fluktuasi harga bahan baku ikan, sarana produksi, dan harga jual produk olahan yang dipengaruhi faktor musiman dan dinamika pasar turut memengaruhi stabilitas usaha pengolahan perikanan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 menunjukkan arah yang positif. Penguatan keberlanjutan program, peningkatan efisiensi usaha, pengendalian risiko produksi, serta sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga dan meningkatkan kinerja sekaligus memastikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN



A. Gambaran Umum

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, memiliki Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 12 menyebutkan bahwa: Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan secara berkelanjutan. Sub sektor perikanan dalam struktur ekonomi di Kabupaten Bandung mempunyai peluang untuk dikembangkan berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung guna memperluas kesempatan kerja, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan pemerataan pendapatan, serta sebagai salah satu sumber protein hewani.

Berikut adalah Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

b. Sekretaris

Sekretaris membawahkan/mengkoordinasikan perencanaan, subbagian umum dan kepegawaian dan analisis keuangan pusat dan daerah.

c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahkan/mengkoordinasikan analisis ketahanan pangan.

d. Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahkan/mengkoordinasikan analisis ketahanan pangan.

e. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya membawahkan/mengkoordinasikan analisis akuakultur.

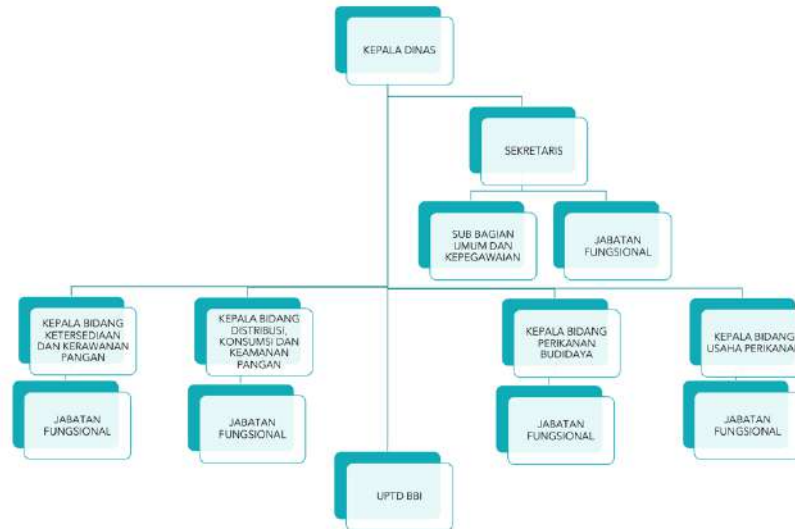
f. Bidang Usaha Perikanan

Bidang Usaha Perikanan membawahkan/mengkoordinasikan pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan, analisis akuakultur dan pengawasan perikanan.

g. UPTD Pembenihan Ikan

UPTD Pembenihan Ikan membawahkan subbagian tata usaha.

Jabatan Fungsional



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh ASN sebanyak 46 orang dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 24 orang, Tenaga Ahli 7 orang. Perkembangan keadaan kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Uraian	Jenis Kelamin		SLTP	SLTA	Diploma III	S1	S2	PPPK Paruh Waktu	Jumlah
		L	P							
1	Kepala	1						1		1
2	Sekretariat	5	8		4	1	6	2	2	15
3	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1	5				4	2	3	9
4	Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan	5	4	1	1		6	1	2	11
5	Bidang Perikanan Budidaya	2	5				4	3	3	10
6	Bidang Usaha Perikanan	4	3			1	4	2	4	11
7	UPTD Pembenihan Ikan	2	1				2	1	10	13
Jumlah		20	26	1	5	2	27	12	24	70

Sumber data: simpelbkpsdm.bandungkab.go.id, 2025

Selain dukungan sumber daya manusia dan anggaran, Dispakan memiliki berbagai aset yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terutama pengembangan sektor perikanan di daerah. Aset-aset tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis dan fungsinya.

Aset tanah yang dimiliki digunakan untuk gedung bangunan kantor, balai benih dan pasar ikan modern. Adapun aset kendaraan terdiri dari operasional roda empat dan roda dua serta kendaraan operasional khusus diantaranya mobil laboratorium uji keamanan pangan segar asal tumbuhan.

Aset peralatan dan mesin diantaranya mesin alat produksi perikanan, mesin peralatan kantor dan perlengkapan lainnya.

Tabel 1. 2. Nilai Asset Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Jenis Aset Tetap	Per 31 Desember 2025		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	23.933.071.000	0	23.933.071.000
2	Peralatan & Mesin	10.497.669.419	7.212.712.410	3.284.957.009
3	Gedung & Bangunan	53.910.480.671	8.963.031.631	44.947.449.040
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.543.460.925	819.239.846	1.724.221.079
5	Aset Tetap Lainnya	19.710.500	0	19.710.500
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah		90.904.392.515	16.994.983.887	73.909.408.628

Sumber: CALK *unaudited*, 2025

B. Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis kinerja dan dinamika pembangunan daerah, isu strategis yang dihadapi DISPAKAN, yaitu:

1. Ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap beras yang masih tinggi, sehingga menghambat percepatan diversifikasi pangan;
2. Akses masyarakat rentan terhadap pangan bergizi yang belum merata dan berkelanjutan;
3. Fluktuasi harga pangan dan input produksi perikanan yang memengaruhi stabilitas usaha dan daya beli masyarakat;
4. Kualitas dan ketersediaan sarana produksi perikanan (air, benih, pakan) yang belum stabil;
5. Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk perikanan, khususnya pada skala usaha mikro dan kecil;
6. Integrasi data pangan dan perikanan lintas sektor yang belum optimal untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitass Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 77 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

D. Sistematika Penyajian

Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah (RPJMD / Renstra baru), sumber daya aparatur, dasar hukum penyusun LKIP dan sistem penyajian LKIP.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2025 – 2029 (jelaskan masa transisi peralihan dari Renstra lama ke Renstra baru. Renstra hasil reviu/perubahan Renstra) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, penjelasan IKU lama dan baru dan Perjanjian Kinerja lama dan Perjanjian Kinerja baru 2025.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, jelaskan capaian kinerja 5 tahun sebagai akuntabilitas kinerja lima tahunan periode RPJMD 2021-2025;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, termasuk faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja 5 th RPJMD 2021-2025;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, sampaikan kondisi efisiensi tahun 2025 (perbup 10 tahun 2025), dampak nasional dan daerah;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



LKIP Tahun 2025 sebagai bagian dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 mengenai petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja. Dalam penyusunan LKIP Tahun 2025, dilakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama setelah ditetapkannya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029. Penyesuaian indikator kinerja dalam masa transisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan implementasi program, sehingga proses pengukuran kinerja dapat dilakukan secara objektif, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2. 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Renstra 2021-2026					Renstra 2025-2029							
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Target PK Awal 2025	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target PK Perubahan 2025				
Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi ikan unggul	Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya → Menjadi indikator program	3,45%	2.83%	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan pembudi daya ikan		Skor PPH Konsumsi (IKU)	85,62 poin				
	Meningkatnya jumlah populasi ikan di perairan umum yang direvitalisasi	Persentase peningkatan Produksi perikanan tangkap → Menjadi indikator program	3,30%	3%			Nilai Tukar Usaha Perikanan (IKU)	100 poin				
	Meningkatnya hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan → Menjadi indikator program	3,00%	3%		Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan Daerah	Persentase capaian tingkat konsumsi beras, sayur dan buah	88,73%				
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan bidang pangan, kelautan dan perikanan	Nilai AKIP → Menjadi indikator kegiatan	82,90	83,25	Meningkatnya Produksi Akuakultur		Persentase Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian sub Sektor Perikanan	1%				
		Nilai IKM	83,57	84,72								
Penguatan akses pangan masyarakat	Meningkatnya intervensi ke daerah rentan rawan pangan	Persentase desa rentan rawan pangan yang terintervensi → Menjadi indikator program	100%	20%					Meningkatnya Produksi Akuakultur		Persentase Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian sub Sektor Perikanan	1%
	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)	Persentase penguatan CPPD → Menjadi indikator kegiatan	61,49%	25%								
	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal → Menjadi indikator kegiatan	Beras 1,02 Sayur buah 0,94	1.00								
	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Tingkat keamanan pangan segar yang diuji → Menjadi indikator program	98%	>85%								

Tabel 2. 2. Tujuan, Sasaran, dan Target Indikator Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2025-2029

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kineja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan							
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan pembudi daya ikan	Skor PPH Konsumsi (IKU)	85,62-85,77	86,13-86,37	86,66-86,98	87,18-87,58	87,71-88,20	88,24-88,81
	Nilai Tukar Usaha Perikanan (IKU)	100-101	100-102	100-103	100-104	100-105	100-105
Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan Daerah	Persentase capaian tingkat konsumsi beras, sayur dan buah	88,73	89,25	89,84	90,37	90,90	91,50
Meningkatnya Produksi Akuakultur	Persentase Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian sub Sektor Perikanan	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %



Tabel 2. 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan bidang pangan, kelautan dan perikanan	Nilai AKIP	83,25	Hasil penilaian Inspektorat
	Nilai IKM	84,72	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap: <ul style="list-style-type: none"> • Standar Pelayanan Penjualan Benih Ikan di UPTD Balai Benih Ikan • Konsultasi Perikanan, Magang, PKL dan Prakerin • Standar Pelayanan Konsultasi dan Perijinan PSAT-PDUK • Pelayanan Fasilitasi Legalitas Usaha Perikanan Perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004
Meningkatnya intervensi ke daerah rentan rawan pangan	Persentase desa rentan rawan pangan yang terintervensi	20%	Jumlah desa rentan awan pangan yang diintervensi / total jumlah desa yang masuk kategori rentan rawan pangan x 100%
Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)	Persentase penguatan CPPD	25%	(Jumlah cadangan pangan kabupaten/Jumlah cadangan pangan yang seharusnya) x 100%
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal	1.00	- (Jumlah Konsumsi beras/Jumlah Konsumsi ideal beras) x 100% - (Jumlah Konsumsi Sayuran dan Buah /Jumlah Konsumsi ideal Sayuran/Buah) x 100%
Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Tingkat keamanan pangan segar yang diuji	>85%	Capaian ditentukan dari 2 kegiatan dengan bobot: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan di peredaran 60% 2. Registrasi dan Sertifikasi 40% → Pengawasan di Peredaran: Data yang dibutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Target Pengawasan di Peredaran yaitu: Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan ditetapkan sebesar 85% (T) 2. Jumlah pengawasan dalam bentuk jumlah contoh/sampel yang diambil (N) 3. Hasil Pengawasan dalam bentuk jumlah sampel/contoh yang memenuhi persyaratan Keamanan Pangan (P) Realisasi PSAT yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu pangan di peredaran $(Y) = P/N \times 100\%$ Capaian (K) = $Y/T \times 100\%$ Capaian Tertimbang (K1) = $K \times 60\%$ → Registrasi dan Sertifikasi

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI												
			<p>Capaian Registrasi dan Sertifikasi (penjumlahan antara ijin edar dan sertifikat yang diterbitkan, termasuk SPPB PSAT; untuk kabupaten/Kota hanya no izin edar) Capaian Kab/Kota</p> <table border="1"> <tr> <td>Jumlah Registrasi/tahun</td> <td>Capaian (X)</td> </tr> <tr> <td>>15</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>11 - ≤ 15</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>6 - ≤10</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>1 - ≤ 5</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> </table> <p>Capaian tertimbang (K2) = 40% x X</p> <p>CAPAIAN TOTAL = K1 + K2</p>	Jumlah Registrasi/tahun	Capaian (X)	>15	100%	11 - ≤ 15	75%	6 - ≤10	50%	1 - ≤ 5	25%	0	0%
Jumlah Registrasi/tahun	Capaian (X)														
>15	100%														
11 - ≤ 15	75%														
6 - ≤10	50%														
1 - ≤ 5	25%														
0	0%														
Meningkatnya produksi ikan unggul	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2.83%	$(\text{Jumlah produksi ikan budidaya tahun } n - \text{tahun } (n-1)) / \text{jumlah produksi ikan budidaya tahun } (n-1) \times 100\%$												
Meningkatnya jumlah populasi ikan di perairan umum yang direvitalisasi	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	3%	$(\text{Jumlah produksi tangkap tahun } n - \text{tahun } (n-1)) / \text{jumlah produksi tangkap tahun } (n-1) \times 100\%$												
Meningkatnya hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan	3%	$(\text{Jumlah produksi olahan ikan tahun } n - \text{tahun } (n-1)) / \text{jumlah produksi olahan ikan tahun } (n-1) \times 100\%$												

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan pembudi daya ikan	Skor PPH Konsumsi	85,62	Hasil Perhitungan SUSENAS (BPS)
	Nilai NTUP	100	Indikator ekonomi yang menggambarkan/ mengukur tingkat kesejahteraan pembudi daya ikan. Nilai Tukar Usaha Perikanan ini dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima pembudi daya ikan dari hasil penjualan dengan indeks harga yang dikeluarkan untuk biaya produksi
Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan Daerah	Persentase capaian tingkat konsumsi beras, sayur dan buah	88,73	Jumlah konsumsi beras, sayur dan buah aktual di bagi target konsumsi beras, sayur dan buah dikali 100 persen

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
Meningkatnya Produksi Akuakultur	Persentase Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian sub Sektor Perikanan	1 %	NTUP tahun n dikurangi NTUP tahun n-1 di bagi NTUP tahun n-1 dikali 100 persen

Program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator tujuan strategis berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 100.33.2/4734/dispakan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2025-2029, yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan dinamika pembangunan daerah. Berdasarkan hasil pemetaan dan pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/Kep-199/dispakan Tahun 2022 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pelaksanaan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dijabarkan dalam 9 program, 23 kegiatan, 65 subkegiatan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan periode transisi perencanaan strategis tahun 2021–2026 menuju tahun 2025–2029. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja tahun 2025 disusun dengan pendekatan integratif, yaitu menempatkan realisasi indikator Renstra sebelumnya sebagai *baseline* pencapaian Renstra baru. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan kinerja serta menjaga konsistensi arah pembangunan perangkat daerah.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator terhadap target Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Kriteria tingkat keberhasilan capaian kinerja diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sangat Berhasil (>100%)
2. Berhasil (80–100%)
3. Cukup Berhasil (60–79%)
4. Tidak Berhasil (<60%)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, ditetapkan dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP). Indikator Renstra sebelumnya yang relevan secara substansi, yaitu Nilai AKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), intervensi desa rentan rawan pangan, kualitas konsumsi pangan, keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT), serta produksi perikanan, dianalisis sebagai capaian pendukung untuk memperkuat capaian tujuan Renstra 2025–2029.

A. 1. Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Tabel 3.1 menampilkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 Renstra 2025-2029.

Tabel 3. 1. Target dan Realisasi IKU Berdasarkan PK Perubahan 2025 Renstra 2025-2029

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan pembudi daya ikan	Skor PPH Konsumsi	85,10	103,40	85,62	95,78	111,87
	Nilai NTUP	118,64	118,64	100	120,90	120,90
Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan Daerah	Persentase capaian tingkat konsumsi beras, sayur dan buah	96,01	96,01	88,73	92,13	103,83
Meningkatnya Produksi Akuakultur	Persentase Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian sub Sektor Perikanan	n/a	n/a	1 %	1,9 %	190,00

Renstra baru menyederhanakan dan menyelaraskan indikator kinerja agar lebih fokus pada hasil dan dampak. Penekanan diarahkan pada peningkatan kualitas konsumsi pangan melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH), serta kesejahteraan pembudi daya ikan melalui Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP). Perubahan indikator ini menunjukkan pergeseran pendekatan dari

pengukuran aktivitas dan *output* menuju pengukuran *outcome* yang langsung dirasakan oleh masyarakat.





TUJUAN Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan pembudi daya ikan

Indikator: Skor PPH Konsumsi

Target: 85,62

Realisasi: 95,78

Capaian: 111,87%

2024
85,1

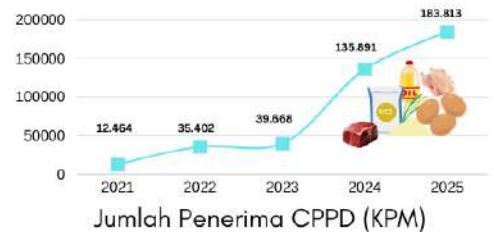
Provinsi
95

2030
88,81

Dukungan Capaian IKU Renstra Lama

Persentase desa rentan rawan pangan yang terintervensi

Intervensi desa rentan rawan pangan tercapai 100%, angka tersebut melampaui sekaligus memenuhi target tahunan Renstra lama (2021-2026).



Persentase penguatan CPPD

Berdasarkan Renstra sebelumnya (2021-2026), target persentase penguatan CPPD ditetapkan secara berbeda, yakni: 8% pada tahun 2022, 30% tahun 2023, 25% tahun 2024, 25% tahun 2025, dan 19% tahun 2026. Pola target tersebut mencerminkan strategi penguatan yang bersifat dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan stabilisasi pangan dan kapasitas fiskal.



Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal

Target jangka menengah dalam Renstra 2021-2026 mengarah pada pencapaian rasio konsumsi ideal sebesar 1,00 secara berkelanjutan. Peningkatan yang signifikan terjadi pada kelompok sayur dan buah, dari 19,6 persen pada tahun 2021 menjadi 30,0 persen pada tahun 2025.

Komoditas	Kab. Bandung (gr/kap/hari)	Provinsi (gr/kap/hari)	Konsumsi Ideal (gr/kap/hari)	Selisih dengan Provinsi	Selisih dengan ideal
Beras	273,12 (susenas) 283,5 (survey)	286	289	-13	-16
Sayur & Buah	235,17 (susenas) 263,6 (survey)	250	262	-15	-27

No	Pengujian	2023		2024		2025	
		Jumlah	PSAT Aman	Jumlah	PSAT Aman	Jumlah	PSAT Aman
1	Rapid Test Residu Pestisida	200	195	200	194	230	222
2	Laboratorium	37	37	100	100	78	78
Tingkat Keamanan PSAT		97.8%		98.0%		97.4%	
Standar Nasional		> 85%		> 85%		> 90%	

Hasil Uji Sampel PSAT PDUK

Tingkat keamanan pangan segar yang diuji



A. 2. Analisis Capaian Tujuan Renstra 2025-2029

T. 1. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan pembudi daya ikan

→ IKU 1. Skor PPH Konsumsi

Sasaran: Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan Daerah

Indikator: Persentase capaian tingkat konsumsi beras, sayur dan Buah

- ***Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target***

Pada tahun 2025, target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Kabupaten Bandung ditetapkan sebesar 85,62, dengan realisasi mencapai 95,78 atau 111,9% dari target. Sementara itu, target persentase capaian tingkat konsumsi beras, sayur, dan buah ditetapkan sebesar 88,73%, dengan realisasi sebesar 92,13% atau 103,83% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat berjalan efektif dan melampaui ekspektasi yang direncanakan pada awal tahun.

- ***Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu***

Tahun 2024, capaian skor PPH konsumsi dan persentase capaian tingkat konsumsi beras, sayur dan buah berturut-turut sebesar 85,10 dan 96,01%. Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian skor PPH tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan sebesar 10,68 poin, namun untuk rasio konsumsi beras dan sayur mengalami penurunan sebesar 3,88 poin. Secara tren keseluruhan, peningkatan skor PPH dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang positif menuju pola konsumsi yang semakin beragam dan seimbang, sekaligus mencerminkan keberhasilan program intervensi pangan dan gizi yang telah dilaksanakan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah**

Target akhir Renstra 2025-2029 untuk skor PPH konsumsi ditetapkan sebesar 88,81. Dengan realisasi tahun ini mencapai 95,78, maka capaian kinerja telah melampaui target jangka menengah sebesar 6,97 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan strategis telah tercapai lebih cepat dari yang direncanakan. Untuk capaian rasio konsumsi beras, sayur dan buah, jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Renstra masih berada di atas target akhir yang direncanakan. Realisasi tahun 2025 masih 0,63 poin persentase lebih tinggi dari target renstra.

Tabel 3. 2. Skor PPH Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025

No	Kelompok Pangan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	1,2	1,0	1,1	0,9	1,51
3	Pangan Hewani	23,6	21,5	20,9	20,9	23,98
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	Kacang-kacangan	5,7	6,7	7,5	7,7	8,59
7	Gula	1,1	0,8	0,9	0,9	1,6
8	Sayur dan Buah	19,6	22,1	25,1	24,5	30,0
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skor PPH Konsumsi Kab. Bandung		81,1	82,2	85,6	85,1	95,78
Skor PPH Jawa Barat		84,1	87,0	93,8	93,28	95,0
Skor PPH Nasional		87,2	92,9	94,1	93,5	97,0

Sumber: Susenas, BPS

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Provinsi/Nasional**

Skor PPH Konsumsi Kabupaten Bandung tahun 2025 berada di atas skor PPH Provinsi Jawa Barat (95,0), namun di bawah capaian nasional (97,0). Adapun konsumsi beras, sayur dan buah masyarakat Kabupaten Bandung relatif masih berada di bawah rata-rata Provinsi dan standar konsumsi ideal.

Tabel 3. 3. Perbandingan Konsumsi Beras, Sayur dan Buah

Komoditas	Kab. Bandung (gr/kap/hari)	Provinsi (gr/kap/hari)	Konsumsi Ideal (gr/kap/hari)	Selisih dengan Provinsi	Selisih dengan Ideal
Beras	273,12 (susenas) 283,5 (survey)	285,70	289	-12,58	-15,88
Sayur & Buah	235,17 (susenas) 263,6 (survey)	250,38	262	-15,21	-26,83

- **Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Secara makro, kelompok padi-padian menunjukkan kontribusi yang relatif stabil sebesar 25,0 persen sepanjang periode perencanaan. Stabilitas ini menandakan bahwa padi-padian masih menjadi pangan pokok utama masyarakat dan belum tergeser secara signifikan oleh sumber pangan lain.

Berdasarkan data susenas, rasio konsumsi padi-padian sebesar 0,94 menggambarkan bahwa konsumsi aktual masih di bawah tingkat ideal, sehingga menunjukkan adanya defisit relatif. Kondisi ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi awal terjadinya pergeseran pola konsumsi atau sebagai dampak dari faktor pembatas seperti daya beli dan distribusi pangan. Dari perspektif ketahanan pangan, rasio ini cenderung mengarah pada upaya pengendalian konsumsi beras yang lebih seimbang dan membuka ruang bagi penguatan pangan alternatif. Hal ini sejalan dengan mulai meningkatnya kontribusi umbi-umbian sebanyak 1,51 persen, meskipun secara umum masih rendah dan berfluktuatif. Peningkatan ini memperlihatkan potensi pengembangan pangan lokal sebagai substitusi parsial padi-padian.

Sebaliknya, hasil piloting survei konsumsi pangan pada 775 KK di 31 desa/kecamatan menunjukkan rasio konsumsi padi-padian sebesar 1,05 yang mengindikasikan kelebihan konsumsi dibandingkan nilai ideal. Kondisi ini mencerminkan situasi mikro di mana ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga relatif baik, sehingga konsumsi beras cenderung meningkat. Namun, dari sudut pandang kualitas konsumsi, rasio yang melebihi 1,00 justru menandakan ketergantungan

yang masih tinggi terhadap padi-padian, serta belum optimalnya diversifikasi pangan di tingkat rumah tangga.

Secara komparatif, perbedaan antara rasio 0,94 (makro susenas) dan 1,05 (hasil survei mikro) menunjukkan adanya ketidaksinkronan pola konsumsi antara level agregat dan rumah tangga. Rasio 0,94 mengarah pada kecenderungan defisit atau transisi menuju pola konsumsi yang lebih beragam, sementara rasio 1,05 menegaskan bahwa pada praktiknya masyarakat masih sangat bergantung pada padi-padian. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh metodologi pengukuran, cakupan wilayah, serta variasi sosial ekonomi antar rumah tangga.

Secara analitik, kondisi ideal bukan hanya mencapai rasio konsumsi padi-padian di angka 1,00, melainkan menjaga keseimbangan konsumsi sesuai PPH dengan mendorong peningkatan konsumsi pangan non-padi yang bernilai gizi tinggi. Oleh karena itu, hasil komparasi ini menegaskan pentingnya kebijakan pangan yang tidak hanya berorientasi pada kecukupan beras, tetapi juga pada penguatan diversifikasi pangan lokal secara berkelanjutan guna mendukung ketahanan dan kemandirian pangan jangka panjang.

Kontribusi pangan hewani mengalami penurunan pada periode 2021–2024, namun kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan membaiknya akses dan konsumsi sumber protein hewani. Sementara itu, kelompok minyak dan lemak serta buah/biji berminyak relatif stabil, menunjukkan pola konsumsi yang cenderung konstan dan telah mendekati proporsi ideal. Kelompok kacang-kacangan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan semakin berkembangnya konsumsi sumber protein nabati.

Peningkatan yang signifikan terjadi pada kelompok sayur dan buah, dari 19,6 persen pada tahun 2021 menjadi 30,0 persen pada tahun 2025.

Tren ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi sayur dan buah, ditunjukkan dari angka rasio konsumsinya berdasarkan angka ideal sebesar 0,89. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi sayur dan buah relatif baik walaupun masih diperlukan penguatan intervensi untuk mendorong peningkatan asupan sayur dan buah secara berkelanjutan. Implikasi terhadap tindak lanjut kinerja diantaranya perlu penguatan program promosi konsumsi sayur dan buah melalui peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan konsumsi sayur dan buah khususnya bagi kelompok rentan.

Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tidak terlepas dari beberapa faktor diantaranya membaiknya kesadaran dan literasi gizi masyarakat. Berbagai kegiatan sosialisasi dan kampanye konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), termasuk edukasi gizi berbasis keluarga dan satuan pendidikan, telah mendorong perubahan preferensi konsumsi masyarakat. Perubahan ini tercermin pada meningkatnya konsumsi sayur, buah, dan sumber protein, yang secara langsung berkontribusi terhadap perbaikan keseimbangan pola konsumsi pangan.

Selain faktor perilaku, peningkatan kualitas konsumsi pangan juga diperkuat oleh dukungan program dan kebijakan pemerintah. Implementasi kolaborasi program teras pangan “sayur dan ikan” yang terintegrasi dengan upaya penurunan stunting diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas asupan pangan rumah tangga. Konsistensi kebijakan lintas sektor dan sinergi antar perangkat daerah turut memperkuat efektivitas intervensi yang berorientasi pada peningkatan Skor PPH.

Di sisi lain, perubahan pola hidup masyarakat yang semakin memperhatikan aspek kesehatan menjadi faktor struktural yang mendukung keberlanjutan capaian. Meningkatnya preferensi terhadap pangan segar dan alami, khususnya sayur dan buah, menunjukkan

adanya pergeseran pola konsumsi jangka menengah yang relatif sejalan dengan prinsip PPH.

Meskipun menunjukkan peningkatan, kualitas konsumsi pangan masih menghadapi tantangan struktural. Ketergantungan konsumsi terhadap padi-padian, terutama beras, masih relatif tinggi dan dipengaruhi oleh preferensi budaya yang kuat. Kondisi ini menjadi kendala utama dalam upaya mewujudkan komposisi konsumsi pangan yang lebih seimbang.

Selain itu, kontribusi pangan lokal non-beras, seperti umbi-umbian dan pangan alternatif lainnya, meskipun meningkat, masih relatif kecil. Keterbatasan inovasi produk olahan, rendahnya persepsi nilai sosial, serta minimnya promosi dan diversifikasi produk menjadi faktor yang menghambat penguatan konsumsi pangan lokal.

Tantangan lainnya adalah kesenjangan daya beli dan akses pangan antar kelompok masyarakat. Fluktuasi harga pangan, khususnya pangan hewani dan buah, membatasi kemampuan sebagian masyarakat untuk mengakses pangan bergizi secara berkelanjutan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan capaian Skor PPH antar wilayah dan kelompok sosial. Di samping itu, keberhasilan peningkatan Skor PPH masih relatif bergantung pada intervensi program pemerintah. Keterbatasan anggaran, perubahan prioritas kebijakan, serta lemahnya koordinasi lintas sektor berpotensi memengaruhi konsistensi peningkatan kualitas konsumsi pangan dalam jangka panjang.

- ***Analisis terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Urusan Pangan menunjukkan variasi antar program dengan capaian kinerja yang pada umumnya didukung oleh tingkat penyerapan anggaran yang relatif memadai:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan memiliki tingkat efisiensi sebesar 4,98% dengan nilai kinerja anggaran 52,74%, yang mengindikasikan

capaian kinerja belum sepenuhnya proporsional terhadap anggaran yang direalisasikan.

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat menunjukkan kinerja menonjol dengan nilai kinerja anggaran mencapai 130,47%, meskipun tingkat efisiensi disesuaikan relatif rendah (12,09%), yang mencerminkan capaian output yang tinggi namun masih didominasi oleh pendekatan efisiensi defensif atau mempertahankan hasil kinerja (*output/outcome*) dengan biaya, waktu, dan sumber daya minimal.
 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan mencatat tingkat efisiensi sebesar 6,89% dengan nilai kinerja anggaran 87,04%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan cukup efektif namun masih memerlukan penguatan dalam optimalisasi penggunaan sumber daya agar dampak intervensi lebih signifikan.
 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 13,92% dan nilai kinerja anggaran 92,29%, yang mengindikasikan kesesuaian antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- ***Analisis Dukungan Program/Kegiatan***

1. Intervensi desa rentan rawan pangan

Intervensi desa rentan rawan pangan tercapai 100%, angka tersebut melampaui sekaligus memenuhi target tahunan Renstra lama (2021-2026). Kondisi ini menjadi dasar dalam Renstra baru untuk mengalihkan fokus kebijakan dari pemenuhan cakupan menuju penguatan kualitas, keberlanjutan intervensi, dan pencegahan munculnya desa rentan rawan pangan baru.

Pelaksanaan intervensi desa rentan rawan pangan menunjukkan capaian yang optimal, dengan realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 20%, sehingga tingkat capaian mencapai 500%. Total penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) tahun 2025 untuk 183.813 KPM, tersebar di 31 kecamatan

pada empat kelompok sasaran strategis, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4. Intervensi Penyaluran CPPD untuk Masyarakat Rentan Tahun 2025

No	Sasaran	Penyaluran CPPD				
		Jumlah KPM	Beras (kg)	Minyak Goreng (liter)	Telur Ayam (kg)	Beras Fortivit (kg)
1	KK Miskin/ Rawan Pangan/ Miskin ekstrim	13.968	139.180	13.968,00	-	-
2	Rawan Gizi/Stunting	24.081	-	18.820,20	23.255	45.158
3	Masyarakat terdampak bencana/Rawan Pangan Transien	29.572	147.360	5.446,00	20	-
4	Masyarakat terdampak inflasi	116.192	593.151	78.855,00	269	-
	Total Tahun 2025	183.813	879.691	117.089,20	23.544	45.158

Capaian tersebut mencerminkan adanya akselerasi program yang signifikan, sekaligus menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan kerawanan pangan pada wilayah yang membutuhkan. Secara keseluruhan, total penyaluran CPPD Tahun 2025 mencapai 879.691 kg beras, 117.089,20 liter minyak goreng, 23.544 kg telur ayam, dan 45.158 kg beras fortivit. Skala dan keragaman jenis bantuan tersebut mencerminkan pendekatan penanganan kerawanan pangan yang tidak bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan tingkat kerentanan dan karakteristik sasaran.

Dalam konteks penanganan kerawanan pangan transien, penyaluran CPPD kepada masyarakat terdampak bencana dan kondisi darurat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan respon cepat terhadap gangguan ketersediaan dan akses pangan. Intervensi ini berperan penting dalam menekan potensi krisis pangan lokal dan menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga pada situasi tidak normal.

Sebagai tambahan, penyaluran CPPD kepada 116.192 KPM terdampak inflasi menjadi langkah strategis dalam mengantisipasi tekanan ekonomi yang berdampak pada daya beli masyarakat. Dengan menyalurkan 593.151 kg beras dan 78.855 liter minyak goreng, program ini berkontribusi pada stabilisasi konsumsi pangan pokok dan mengurangi risiko peningkatan jumlah rumah tangga rawan pangan akibat fluktuasi harga.

Tabel 3.5. Rekapitulasi Jumlah Masyarakat Rentan Penerima CPPD Tahun 2021-2025

PENERIMA	2021	2022	2023	2024	2025
KK Miskin/ Rawan Pangan/ Miskin ekstrim	8.519	18.691	18.865	7.383	13.968
Rawan Gizi/Stunting	1	1.806	9.204	7.786	24.081
Masyarakat terdampak bencana/Rawan Pangan Transien	3.944	12.841	933	35.623	29.572
Masyarakat terdampak inflasi	-	2.064	10.666	85.099	116.192
Total Penerima	12.464	35.402	39.668	135.891	183.813

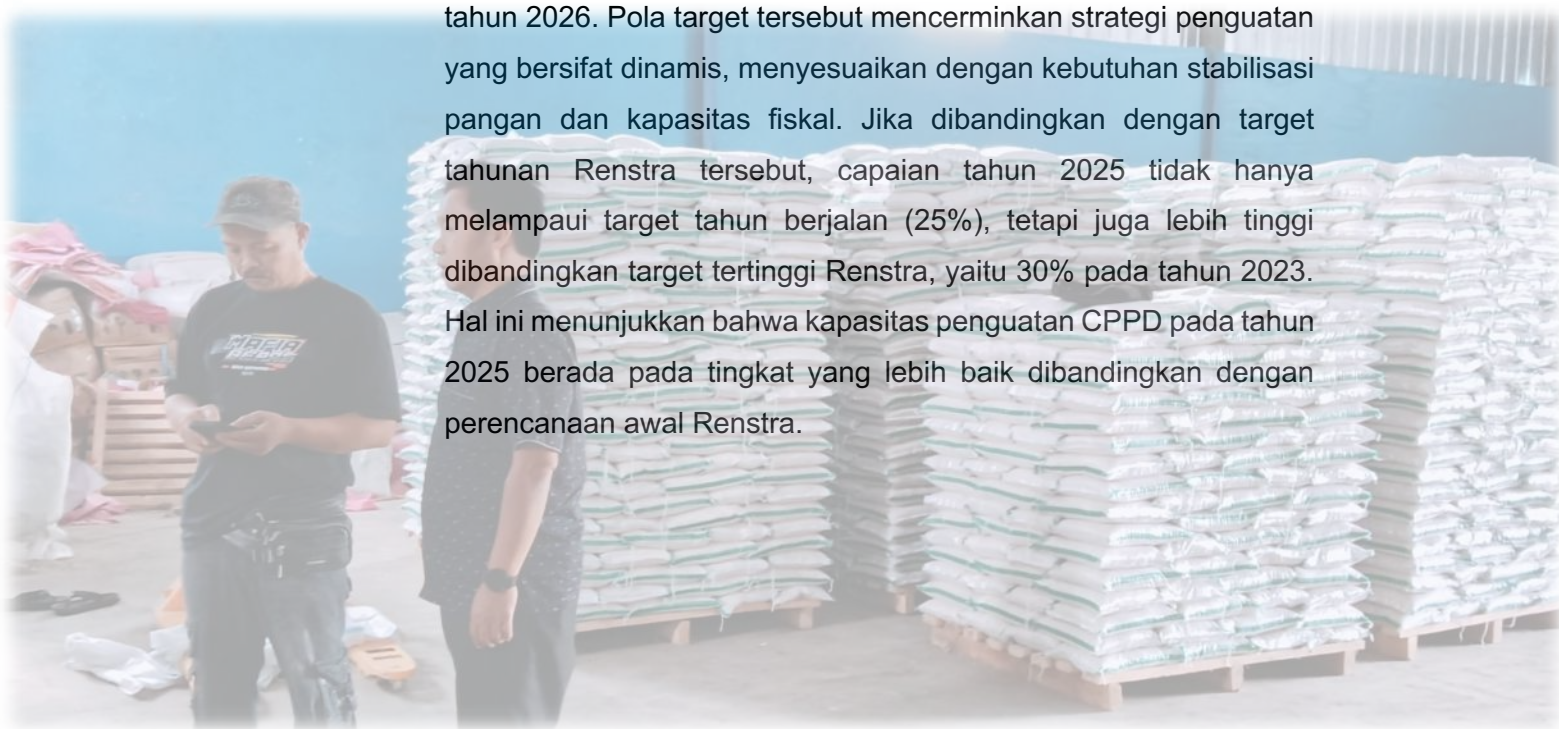
Intervensi pada daerah rawan pangan secara keseluruhan terealisasi 100%; Jumlah desa potensi rentan rawan pangan yang diintervensi sebanyak 12 desa berdasarkan SK Bupati Bandung Nomor 500.1.1/KEP.21-DISPAKAN/2025 tentang Penetapan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2025, dengan sasaran penerima manfaat sebanyak 6.934 keluarga. Pemberian bantuan pangan dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai bentuk penguatan keberlanjutan intervensi dan mitigasi risiko kerawanan pangan pada rumah tangga sasaran.

Tabel 3. 6. Evaluasi dan Strategi Kinerja Intervensi Desa Rentan Rawan Pangan

Aspek	Evaluasi Kinerja	Permasalahan	Strategi
Capaian Target	Realisasi intervensi mencapai 100%, melampaui target tahunan 20% (capaian 500%) dan telah memenuhi target akhir Renstra 2021–2026 sebesar 100%.	Capaian bersifat kuantitatif tanpa diikuti penguatan kualitas dan dampak jangka panjang.	Mengalihkan fokus kebijakan dari pemenuhan cakupan ke peningkatan kualitas dan keberlanjutan intervensi.
Perencanaan dan Pelaksanaan	Perencanaan berbasis data desa rentan rawan pangan dan didukung sinergi lintas perangkat daerah.	Perubahan metode analisis sehingga berpotensi meningkatkan jumlah desa rentan rawan pangan.	Penguatan pengumpulan dan analisis data.
Dukungan Lintas Sektor	Kolaborasi pusat–daerah, perangkat daerah, dan pemerintah desa berjalan efektif.	Penurunan komitmen lintas sektor.	Penguatan koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan.
Keberlanjutan Program	Intervensi telah menjangkau seluruh desa sasaran.	Munculnya desa rentan rawan pangan baru.	Integrasi intervensi dengan program ketahanan pangan desa, pemberdayaan ekonomi, dan adaptasi perubahan iklim/sosial.
Dampak Pembangunan	Kontribusi signifikan terhadap percepatan pencapaian sasaran ketahanan pangan daerah.	Dampak intervensi tidak jangka panjang.	Penajaman intervensi berbasis kebutuhan spesifik desa dan monitoring dampak pasca-intervensi.

2. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Berdasarkan Renstra sebelumnya (2021–2026), target persentase penguatan CPPD ditetapkan secara berbeda, yakni: 8% pada tahun 2022, 30% tahun 2023, 25% tahun 2024, 25% tahun 2025, dan 19% tahun 2026. Pola target tersebut mencerminkan strategi penguatan yang bersifat dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan stabilisasi pangan dan kapasitas fiskal. Jika dibandingkan dengan target tahunan Renstra tersebut, capaian tahun 2025 tidak hanya melampaui target tahun berjalan (25%), tetapi juga lebih tinggi dibandingkan target tertinggi Renstra, yaitu 30% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas penguatan CPPD pada tahun 2025 berada pada tingkat yang lebih baik dibandingkan dengan perencanaan awal Renstra.



Tabel 3.7. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis CPPD Tahun 2021-2025

KOMODITAS	2021	2022	2023	2024	2025
Beras (Kg)	172.618	285.749	752.016	870.000	402.623
Beras Fortivit (Kg)	-	10.636	-	10.000	68.843
Daging Ayam (Kg)	-	7.612	-	-	-
Minyak Goreng (Liter)	-	46.364	36.360	185.181	20.000
Ikan (Kg)	5.000	18.401	10.201	4.000	-
Daging Sapi (Kg)	-	-	13.500	-	-
Telur Ayam (Kg)	-	-	-	-	34.421
Anggaran (Rp)	2.921.624.402	6.650.376.800	13.502.636.700	17.158.183.800	10.188.688.200

Tabel 3.8. Evaluasi dan Strategi Kinerja Penguatan CPPD

No	Evaluasi Kinerja	Permasalahan	Strategi	Area Perbaikan
1	Rekomendasi besaran CPPD tidak selaras dengan kapasitas aktual	Target terlalu rendah atau tinggi	Penetapan target CPPD Renstra baru berbasis Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah	Target CPPD Renstra mencerminkan kualitas kinerja sesungguhnya; tidak terjadi capaian ekstrem (>120%) secara berulang
2	Ketergantungan pada mekanisme pengadaan dan siklus anggaran	Keterlambatan, rendahnya respons terhadap kondisi darurat	Penguatan kebijakan pengadaan CPPD yang lebih adaptif dan tepat waktu	Penguatan CPPD terealisasi sesuai jadwal; tidak terjadi keterlambatan signifikan
3	Fluktuasi harga dan ketersediaan pangan strategis	Volume CPPD tidak optimal	Diversifikasi komoditas cadangan pangan dan pengaturan waktu pengadaan	Stabilitas volume CPPD terjaga; deviasi harga pengadaan dapat dikendalikan
4	Efisiensi anggaran	Ketergantungan tinggi pada APBD	Penguatan tata kelola dan kapasitas SDM pengelola CPPD	Pengelolaan CPPD berjalan efisien dan berkelanjutan; nilai efisiensi tetap baik

3. Pemantauan dan pembinaan konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal

Target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Renstra (2021-2026) mengarah pada pencapaian rasio konsumsi ideal

sebesar 1,00 secara berkelanjutan. Realisasi Tahun 2025 menunjukkan bahwa target tersebut hampir tercapai, namun masih terdapat ketimpangan komposisi konsumsi, khususnya dominasi konsumsi beras yang melebihi ideal dan konsumsi sayur serta buah yang masih di bawah standar. Konsumsi beras, sayur dan buah masyarakat Kabupaten Bandung relatif masih berada di bawah rata-rata Provinsi dan standar konsumsi ideal. Kesenjangan terbesar terdapat pada konsumsi sayur dan buah. Program/kegiatan yang mendukung terhadap peningkatan kualitas konsumsi tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. 9. Program/Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan

No	Program	Fokus Kegiatan	Strategi Pelaksanaan	Sasaran
1	Penguatan Program Piloting Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi B2SA	Perubahan perilaku konsumsi masyarakat	Intensifikasi edukasi dan kampanye B2SA berbasis keluarga dan sekolah; integrasi pesan B2SA dalam kegiatan pangan murah dan layanan masyarakat	Rumah tangga, pelajar
2	Optimalisasi Program Teras Pangan	Peningkatan akses pangan bergizi	Pengembangan teras pangan untuk komoditas sayur, buah dan ikan yang mudah dibudidayakan; pendampingan KWT dan rumah tangga penerima manfaat	KWT, rumah tangga
3	Penguatan Program GEMARIKAN	Diversifikasi sumber protein dan peningkatan kualitas gizi	Sinkronisasi GEMARIKAN dengan B2SA; edukasi gizi terpadu (ikan, sayur, buah) sebagai menu harian keluarga. Penajaman sasaran pada wilayah konsumsi sayur dan buah terendah; integrasi program pangan dengan kesehatan dan penanganan stunting	Keluarga, ibu dan anak, wilayah prioritas
4	Penguatan Program Penanganan Rawan Pangan melalui Penyaluran CPPD	Intervensi bantuan pangan untuk mendukung perubahan pola konsumsi, tidak hanya pemenuhan kuantitas.	Sinkronisasi bantuan pangan/CPPD dengan B2SA	Masyarakat rentan

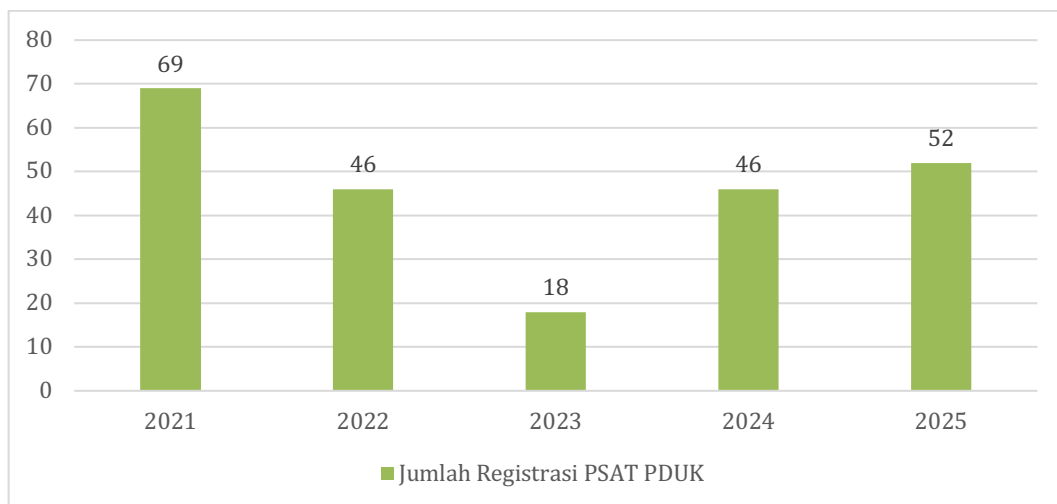
4. Pengawasan keamanan pangan segar

Tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) mencapai 98,4% (>90%), dengan capaian 115,76%. Dibandingkan tahun 2024, tingkat keamanan pangan segar tetap tinggi dan stabil (98% menjadi 98,4%). Keamanan pangan segar (PSAT) telah melampaui

standar minimal nasional (>90%). Stabilitas capaian kinerja yang tinggi tersebut mencerminkan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan terhadap standar keamanan pangan, sebagai hasil dari pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Tabel 3. 10. Hasil Uji Sampel PSAT 2023-2025

No	Penguujian	2023		2024		2025	
		Jumlah	PSAT Aman	Jumlah	PSAT Aman	Jumlah	PSAT Aman
1	Rapid Test Residu Pestisida	200	195	200	194	230	222
2	Laboratorium	37	37	100	100	78	78
Tingkat Keamanan PSAT		97,8 %		98 %		97,4 %	
Standar Nasional		> 85 %		> 85 %		> 90 %	



Gambar 2. Jumlah Registrasi PSAT PDUK

Capaian tersebut tidak terlepas dari penguatan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara terintegrasi, melalui:

1. Penguujian mutu dan keamanan PSAT. Penguujian dan pengawasan PSAT diarahkan tidak hanya pada pasar dan produsen, tetapi juga pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG, sehingga potensi risiko cemaran pangan dapat dicegah sejak hulu;

2. Pembinaan pelaku usaha pangan, hingga peningkatan koordinasi lintas sektor. Dalam konteks pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), keberhasilan pengawasan PSAT menjadi faktor kunci dalam menjamin bahwa bahan pangan yang digunakan oleh SPPG memenuhi standar keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi.

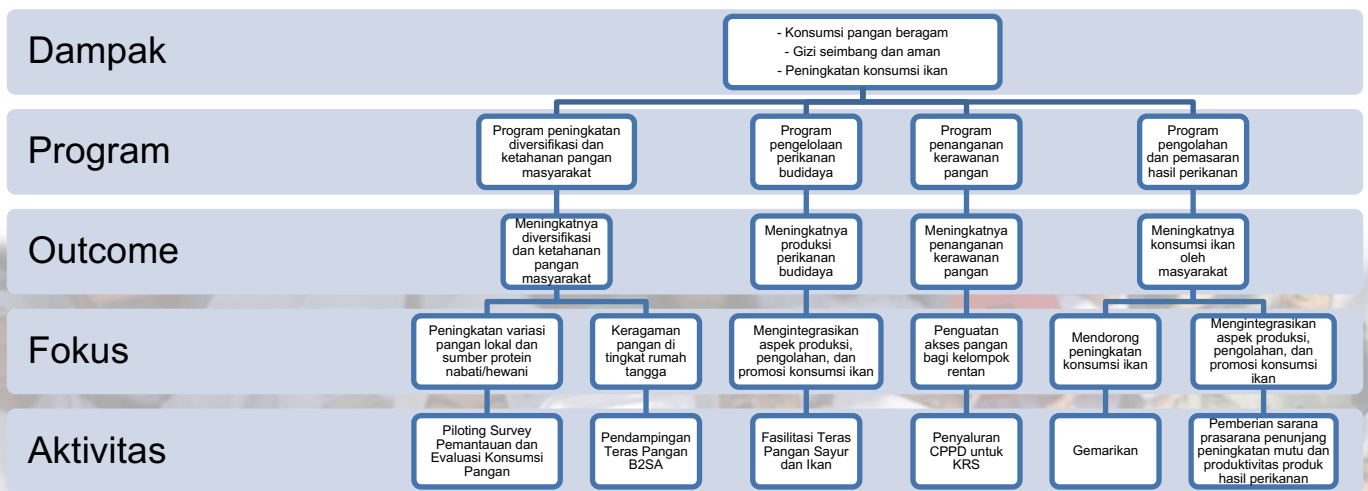
Dengan capaian yang telah melampaui standar nasional, program pengawasan keamanan pangan yang terintegrasi dengan pengawasan SPPG dalam pelaksanaan MBG dinilai akan efektif dan bernilai strategis. Penguatan sinergi lintas sektor dan penajaman pengawasan berbasis risiko akan semakin meningkatkan kualitas layanan keamanan pangan dan mendukung keberhasilan program MBG secara berkelanjutan.

Tabel 3. 11. Evaluasi terhadap Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan

No	Risiko Operasional	Implikasi Kinerja	Strategi	Area Perbaikan
1	Kepatuhan pelaku usaha PSAT menurun	Penurunan persentase PSAT memenuhi standar keamanan	Intensifikasi pembinaan dan pengawasan kolaboratif berkala; penerapan sanksi bertahap oleh DPMPTSP berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar	Kepatuhan pelaku usaha PSAT terjaga/meningkat
2	Keterbatasan SDM pengawas	Pengawasan tidak optimal dan temuan terlambat	Peningkatan kapasitas dan penambahan kompetensi SDM pengawas	Persentase petugas pengawas kompeten meningkat
3	Keterbatasan sarana pengujian lapangan	Kualitas hasil pengawasan menurun	Penguatan sarana uji cepat dan kerja sama laboratorium	Kecepatan dan akurasi pengujian meningkat
4	Sistem pelaporan belum terintegrasi	Tindak lanjut temuan tidak tepat waktu	Pengembangan sistem monitoring dan pelaporan berbasis data	Waktu tindak lanjut temuan lebih cepat
5	Koordinasi lintas sektor belum optimal	Pengawasan tidak berkelanjutan	Penguatan sinergi lintas OPD dan pemangku kepentingan	Konsistensi capaian PSAT tinggi dan stabil

No	Risiko Operasional	Implikasi Kinerja	Strategi	Area Perbaikan
6	Rendahnya kesadaran konsumen	Tekanan pasar terhadap keamanan pangan rendah	Edukasi publik dan kampanye keamanan pangan	Kesadaran konsumen terhadap PSAT aman meningkat

Upaya meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat selain didukung oleh program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, juga selaras dengan program penanganan kerawanan pangan, program pengelolaan perikanan budidaya serta program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.



Gambar 3. Crosscutting Program Pendukung Capaian Skor PPH Konsumsi





TUJUAN Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan pembudi daya ikan

Indikator: Nilai Tukar Usaha Perikanan

Target: 100

Realisasi: 120,90

Capaian: 120,90%

2024
118,64

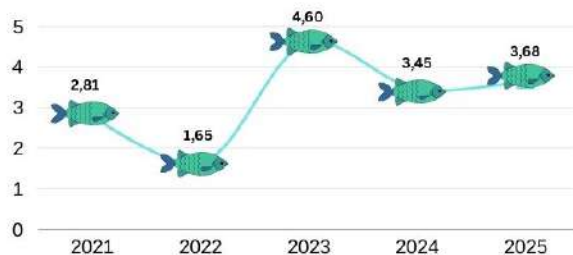
Provinsi
95,62

2030
106

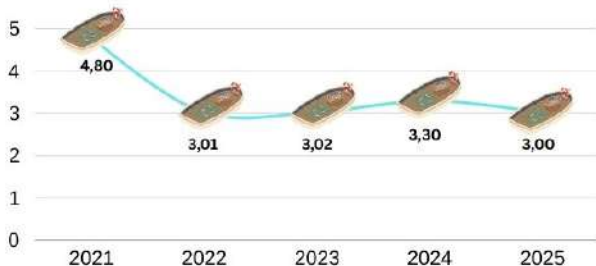
Dukungan Capaian IKU Renstra Lama

Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

Laju produksi perikanan budi daya Kabupaten Bandung masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan nasional (5,22%), meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan kinerja yang relatif terkendali dan berkelanjutan serta telah melampaui target tahun pertama Renstra Baru (2025-2029). Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan budi daya air tawar yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan kapasitas pembudi daya.



Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap

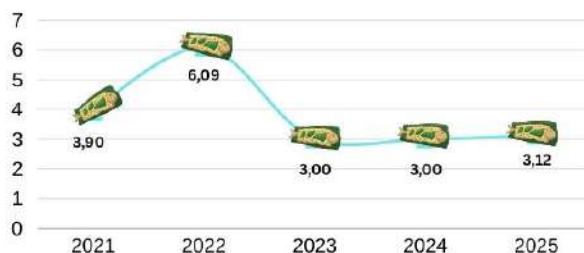


Secara nasional, produksi perikanan tangkap (perairan darat) tercatat tumbuh melambat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,28%. Laju produksi perikanan tangkap Kabupaten Bandung tahun 2025 menunjukkan capaian yang sesuai dengan target Renstra Baru (2025-2029). Kondisi ini mengindikasikan pelaksanaan program dan kegiatan perikanan tangkap pada tahun pertama Renstra Baru berjalan sesuai dengan perencanaan.

IKK: Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

NTPHP sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) tertuang dalam Dokumen RPJMD 2025-2029, ditetapkan dengan target sebesar 100 poin pada tahun 2025. Realisasi kinerja mencapai 101,90 poin, atau melampaui target sebesar 1,90 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat kesejahteraan pengolah hasil perikanan berada pada kondisi positif, target pertumbuhan produksi perikanan ikan olahan tahun 2025 sebesar 3%, tercapai 104% dari target.

Persentase peningkatan produksi ikan olahan



→ IKU 2. Nilai Tukar Usaha Perikanan

Sasaran: Meningkatnya Produksi Akuakultur

Indikator: Persentase Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian sub Sektor Perikanan

- **Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target**

Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan, khususnya pembudi daya ikan, dengan membandingkan indeks harga yang diterima terhadap indeks harga yang dibayar. Pada tahun 2025, target NTUP sebesar 100 berhasil dilampaui dengan realisasi 120,90 atau 120,90%. Untuk indikator Persentase Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Sub Sektor Perikanan, pada tahun 2025 ditetapkan target peningkatan sebesar 1%, sementara realisasi yang dicapai sebesar 1,9%. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 190% dari target, atau melampaui target sebesar 0,9 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli dan kesejahteraan pembudi daya ikan berada pada kondisi sangat baik, di mana pendapatan relatif lebih tinggi dibandingkan biaya produksi.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu**

Realisasi 2025 (120,90) meningkat dibandingkan 2024 (118,64). Kenaikan ini menunjukkan tren positif yang konsisten, menandakan stabilitas usaha pembudi daya ikan di tengah fluktuasi harga pakan dan input produksi.

Tabel 3. 12. NTUP Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024

NTUP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Bandung	-	104,47	109,18	118,50	118,64
Provinsi	106,60	101,89	117,97	111,05	117,01
Nasional	105,42	110,97	116,18	104,92	114,32

Untuk indikator Persentase Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Sub Sektor Perikanan, pada tahun 2024 indikator ini belum

tersedia datanya (n/a) baik dari sisi realisasi maupun capaian, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan secara kuantitatif. Namun demikian, realisasi pada tahun 2025 dapat dipandang sebagai baseline awal pengukuran kinerja indikator, yang selanjutnya dapat menjadi dasar evaluasi tren peningkatan NTUP subsektor perikanan pada tahun-tahun berikutnya.

- ***Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah***

NTUP telah melampaui target jangka menengah, yang umumnya ditetapkan pada posisi NTUP di atas 100. Walaupun nilainya belum optimal, namun konsisten berada di atas angka 100. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan usaha perikanan secara agregat masih lebih besar dibandingkan biaya produksi rumah tangga pelaku usaha, sehingga sektor perikanan tetap menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat.

Untuk indikator Persentase Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Sub Sektor Perikanan, target akhir Renstra untuk indikator ini ditetapkan sebesar 6%. Dengan realisasi tahun 2025 sebesar 1,9%, maka capaian tersebut telah memenuhi sekitar 31,7% dari target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap awal periode perencanaan, kinerja indikator telah menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan menuju pencapaian target jangka menengah.

- ***Perbandingan Capaian Kinerja dengan Provinsi/Nasional***

NTUP di atas 100 merupakan standar nasional sebagai indikator kesejahteraan pembudi daya ikan. Realisasi 120,90 menunjukkan kinerja jauh di atas standar nasional. Secara umum, perkembangan NTUP di tingkat provinsi dan nasional menunjukkan tren kenaikan yang relatif moderat, umumnya berada pada kisaran sekitar 1–2% dalam periode tertentu. Jika dibandingkan dengan perkembangan tersebut, realisasi peningkatan NTUP subsektor perikanan daerah sebesar 1,9% berada dalam kisaran yang sejalan bahkan relatif kompetitif dengan tren peningkatan NTUP di tingkat provinsi maupun nasional.

- ***Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan***

Realisasi kinerja NTUP tahun 2025 menunjukkan capaian yang melampaui target. Dengan target peningkatan sebesar 1% per tahun, realisasi NTUP mencapai 1,9%, serta meningkat signifikan dibandingkan capaian tahun 2024 yang hanya sebesar 0,12%. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan kinerja usaha perikanan secara agregat, khususnya dari sisi kemampuan pelaku usaha dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan dan biaya produksi.

Namun demikian, capaian NTUP perlu dievaluasi lebih lanjut. Kenaikan NTUP lebih mencerminkan efisiensi relatif dalam penggunaan input usaha, terutama melalui pengendalian biaya produksi, dibandingkan peningkatan kinerja produktif yang bersumber dari ekspansi nilai usaha. Dengan kata lain, efisiensi yang tercapai bersifat defensif, yaitu berorientasi pada bertahan dan menekan risiko, bukan produktif yang mendorong pertumbuhan nilai tambah secara berkelanjutan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan NTUP belum sepenuhnya ditopang oleh kenaikan produktivitas, baik dari sisi volume maupun kualitas hasil perikanan. Selain itu, kontribusi hilirisasi dan diversifikasi produk perikanan terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha masih relatif terbatas. Akibatnya, meskipun biaya dapat ditekan, nilai tambah usaha perikanan belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Secara strategis, capaian NTUP tahun 2025 dapat dipandang sebagai modal awal yang positif, namun sekaligus menjadi sinyal perlunya pergeseran kebijakan dari pendekatan efisiensi biaya menuju penguatan produktivitas dan nilai tambah. Tanpa penguatan pada aspek hilirisasi, inovasi produk, dan peningkatan produktivitas usaha perikanan, peningkatan NTUP berpotensi bersifat stagnan dan rentan

terhadap tekanan eksternal, seperti fluktuasi harga input dan perubahan pasar.

Keberhasilan kinerja sektor perikanan tidak terlepas dari stabilitas harga hasil perikanan yang relatif terjaga, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani. Permintaan yang cenderung stabil tersebut memberikan kepastian pasar bagi pembudi daya dan pelaku usaha perikanan, sehingga mampu menjaga keberlanjutan usaha di tengah dinamika biaya produksi.

Selain faktor pasar, intervensi pemerintah melalui bantuan sarana produksi dan pendampingan teknis berperan signifikan dalam menekan risiko usaha. Dukungan ini membantu pembudi daya menjaga keseimbangan antara biaya dan pendapatan, terutama pada kelompok usaha skala kecil yang rentan terhadap fluktuasi harga input. Program edukasi konsumsi pangan dan diversifikasi pangan lokal juga turut memperluas permintaan terhadap produk perikanan, sehingga memperkuat sisi hilir usaha perikanan.

Di sisi produksi, sebagian pembudi daya masih mengandalkan tenaga kerja keluarga dan sistem produksi sederhana, yang secara tidak langsung membantu menekan biaya operasional. Namun, kondisi ini juga menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi biaya belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan produktivitas, sehingga potensi pengembangan usaha masih belum optimal.

Di balik capaian tersebut, sektor perikanan masih menghadapi sejumlah faktor penghambat. Fluktuasi harga pakan dan benih menjadi tantangan utama yang berpengaruh langsung terhadap struktur biaya produksi. Selain itu, skala usaha pembudi daya yang relatif kecil dan belum terintegrasi dalam rantai pasok yang lebih luas membatasi kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi permintaan dalam jumlah besar dan berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan upaya yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan pembudi daya menjadi kunci untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha. Di sisi hulu, penerapan teknologi budidaya yang lebih efisien diharapkan mampu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas. Sementara itu, peningkatan akses pasar dan pengembangan kemitraan usaha perlu didorong agar pembudi daya dapat terhubung dengan rantai pasok yang lebih luas dan stabil.

- ***Analisis terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

Efisiensi penggunaan sumber daya, secara agregat, urusan kelautan dan perikanan mencapai kinerja yang sangat memuaskan. Rata-rata capaian kinerja seluruh program sebesar 137,04% (Sangat Tinggi), dengan realisasi anggaran rata-rata 95,55% (Sangat Tinggi). Nilai kinerja anggaran rata-rata sebesar 1,07 mengindikasikan bahwa anggaran yang diserap telah menghasilkan *output* kinerja yang setara atau melebihi target, sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah (0,56%) dengan nilai kinerja anggaran 85,31%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar anggaran terserap sesuai pagu, capaian kinerja relatif belum optimal dibandingkan besaran sumber daya yang digunakan. Rendahnya efisiensi mencerminkan keterbatasan *output* atau hasil kegiatan terhadap biaya yang dikeluarkan.
2. Program Perikanan Budidaya, menghasilkan capaian kinerja paling menonjol, dengan nilai kinerja anggaran sangat tinggi (150,93%) dan tingkat efisiensi yang juga tinggi, meskipun terdapat variasi antar kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa *output* dan *outcome* yang dihasilkan melampaui target dengan dukungan anggaran yang relatif efisien.
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, berada pada kategori efisien dan efektif, dengan nilai kinerja anggaran 119,67% serta tingkat efisiensi yang relatif baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan mampu menghasilkan kinerja yang signifikan dengan pemanfaatan anggaran yang terkendali. Meskipun demikian, masih terdapat sub kegiatan dengan efisiensi moderat hingga rendah, yang mengindikasikan perlunya optimalisasi metode pengawasan dan penguatan kapasitas SDM, agar efisiensi program dapat lebih konsisten di seluruh kegiatan.

Keberhasilan implementasi upaya tersebut didukung oleh sejumlah program yang telah berjalan, seperti program pemberdayaan pembudi daya ikan, gerakan konsumsi pangan lokal dan B2SA, serta pendampingan teknis dan penyuluhan. Namun demikian, untuk memperkuat dampak jangka menengah dan panjang, diperlukan penguatan program strategis, khususnya pada peningkatan nilai tambah produk akuakultur, perluasan akses pembiayaan usaha perikanan, serta percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan sektor perikanan diharapkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas usaha, tetapi juga meningkatkan daya saing dan kesejahteraan pelaku usaha secara berkelanjutan.

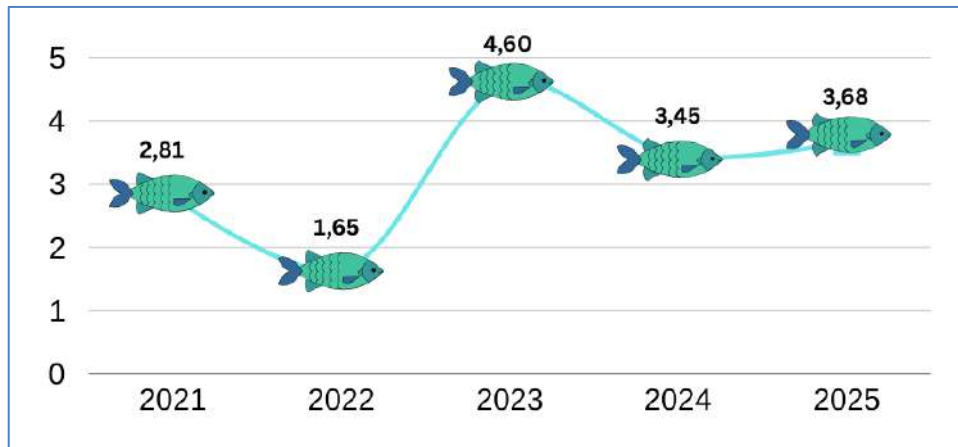
- ***Analisis Dukungan Program/Kegiatan***

- 1. Peningkatan produksi perikanan budi daya**

Tahun 2025, produksi perikanan budi daya tumbuh sebesar 3,68% dengan realisasi produksi mencapai 17.834,14 ton dari target pertumbuhan sebesar 2,83% atau tercapai 130,03%. Capaian tersebut didorong dari produksi pembesaran ikan mas, nila dan lele di Kolam Air Tenang (KAT) dan minapadi. Dibandingkan tahun 2024, tren pertumbuhan produksi perikanan budi daya juga meningkat dari 3,45% menjadi 3,68%.

Tabel 3. 13. Realisasi Produksi Perikanan Budi Daya 2021-2025

Jenis Usaha	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kolam	15.084,23	15.288,78	16.079,00	16.680,79	17.284,14
Minapadi	554,70	607,58	548,49	520,35	550,00
Total	15.638,93	15.896,36	16.627,49	17.201,14	17.834,14



Gambar 4. Pertumbuhan Perikanan Budi Daya 2021-2025

Laju produksi perikanan budi daya Kabupaten Bandung masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan nasional, meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan kinerja yang relatif terkendali dan berkelanjutan serta telah melampaui target tahun pertama Renstra Baru (2025-2029). Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan budi daya air tawar yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan kapasitas pembudi daya. Secara nasional, produksi perikanan budi daya tumbuh rata-rata sebesar 5,22% dengan kontribusi produksi berkisar 5–6 juta ton/tahun (Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Perikanan, 2025), sementara Kabupaten Bandung mencatat pertumbuhan sebesar 3,68%. *Gap* pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh skala produksi, tingkat intensifikasi budi daya, serta dukungan sarana, teknologi, dan investasi wilayah.

Capaian produksi perikanan budi daya Kabupaten Bandung didukung sinergi beberapa program strategis yang secara langsung meningkatkan kapasitas produksi, minat usaha, dan keberlanjutan usaha budi daya ikan, antara lain:

1. Pemberian Stimulan Sarana dan Prasarana Budi Daya

Tahun 2025, hibah sarana prasarana budi daya diberikan kepada 86 kelompok pembudi daya, bertujuan sebagai stimulan bagi pembudi daya kecil dan pemula. Bantuan paket pembesaran, pembenihan, dan budi daya ikan hias diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi kelompok sekaligus memperluas basis pelaku usaha perikanan, yang berdampak terhadap peningkatan *output* produksi dan kesejahteraan pembudi daya.

2. Program Prioritas Daerah (Wirausaha Baru/WUB)

Program WUB mendorong lahirnya wirausaha baru di sektor perikanan budi daya, khususnya pada komoditas lele dan ikan hias. Program ini tidak hanya meningkatkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga memperkuat jejaring antar pembudi daya dan UMKM, sehingga berkontribusi pada peningkatan skala produksi dan keberlanjutan usaha.

3. Dukungan Program Prioritas Nasional MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong peningkatan permintaan ikan sebagai sumber protein lokal, khususnya ikan lele. Hal ini meningkatkan motivasi pembudi daya untuk memperbesar kapasitas produksi sekaligus membentuk rantai pasok yang lebih sehat dan berkelanjutan antara pembudi daya, SPPG, dan pasar.

4. Penerapan Teknologi Budi daya

Adopsi teknologi budi daya seperti bioflok dan RAS berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas melalui efisiensi pakan, kualitas air yang terjaga, dan padat tebar yang lebih tinggi. Teknologi ini mendukung stabilitas produksi sepanjang tahun dan meningkatkan hasil per satuan luas.

5. Pengembangan Kampung Perikanan Budi daya

Pembinaan dan fasilitasi Kampung Perikanan Budidaya di Desa Padaulun (Iele) dan Desa Wangisagara (nila) memperkuat pendekatan kawasan terpadu melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan dukungan sarana produksi. Pendekatan ini mendorong kemandirian pembudi daya dan penguatan ekonomi lokal.

6. Peluang Kemitraan dan Ekspor Ikan Hias

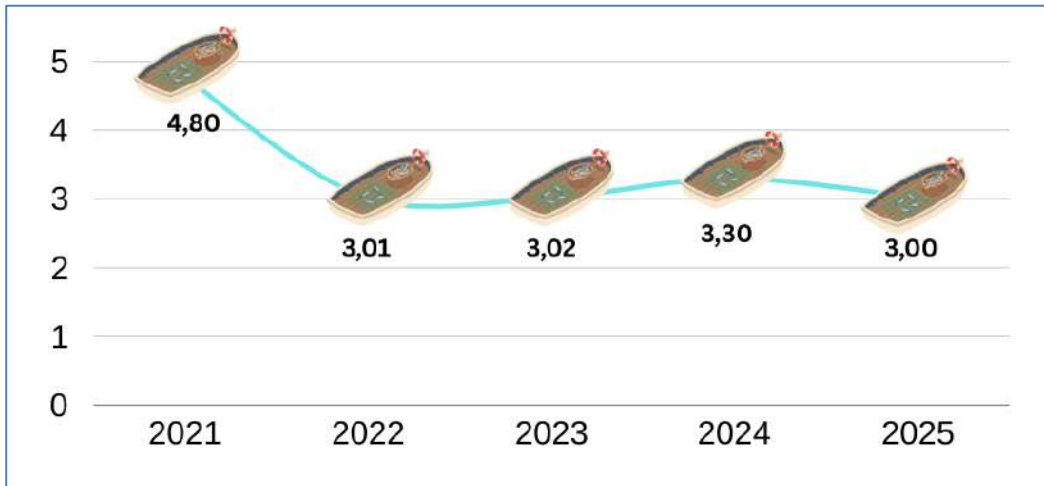
Potensi ekspor ikan hias Kabupaten Bandung membuka peluang kemitraan yang luas dan memberikan insentif ekonomi bagi pembudi daya. Hal ini menstimulasi pertumbuhan usaha ikan hias dan memperluas kontribusi subsektor ini terhadap total produksi perikanan budi daya.

2. Peningkatan produksi perikanan tangkap

Realisasi kinerja laju produksi perikanan tangkap tahun 2025 menunjukkan capaian yang sesuai dengan target Renstra Baru (2025–2029). Pada tahun 2025, produksi perikanan tangkap tumbuh sebesar 3% atau mencapai 281,4 ton, sejalan dengan target pertumbuhan yang ditetapkan sebesar 3% (268,77 ton), sehingga tingkat capaian kinerja tercatat 100%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan perikanan tangkap pada tahun pertama Renstra Baru berjalan sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3. 14. Realisasi Produksi Perikanan Tangkap 2021-2025

Kegiatan Perikanan	Hasil Produksi (Ton)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Perairan Umum Darat	249,20	256,70	264,45	273,18	281,37



Gambar 5. Pertumbuhan Perikanan Tangkap 2021-2025

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, kinerja laju produksi perikanan tangkap Kabupaten Bandung tahun 2025 menunjukkan hasil yang relatif lebih baik. Secara nasional, produksi perikanan tangkap perairan darat tercatat tumbuh melambat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,28% atau sekitar 450 ribu ton/tahun (Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Perikanan, 2025), sementara Kabupaten Bandung mampu mempertahankan laju pertumbuhan sebesar 3%.

Berdasarkan identifikasi Pokmaswas, stabilnya produksi perikanan tangkap tidak terlepas dari dukungan pengawasan perairan umum darat yang dilakukan secara rutin, terutama dalam mencegah praktik penangkapan tidak ramah lingkungan, penggunaan alat tangkap terlarang, serta deteksi dini pencemaran ringan di sungai dan situ. Pengawasan ini berkontribusi menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sehingga produksi dapat dipertahankan tanpa eksploitasi berlebihan.

→ **IKK. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)**

- ***Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target***

Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) tertuang dalam Dokumen RPJMD 2025-2029, ditetapkan dengan target sebesar 100 poin pada tahun 2025. Realisasi kinerja mencapai 101,90 poin, atau melampaui target sebesar 1,90 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat kesejahteraan pengolah hasil perikanan berada pada kondisi positif, di mana indeks harga yang diterima rumah tangga pengolah lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayarkan.

- ***Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu***

Tahun 2025 menjadi *baseline* dalam pengukuran NTPHP, dengan demikian belum tersedia data historis untuk membandingkan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya maupun tren beberapa tahun terakhir.

- ***Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah***

Dalam dokumen perencanaan jangka menengah, target akhir NTPHP ditetapkan sebesar 106 poin. Realisasi tahun 2025 sebesar 101,90 poin menunjukkan bahwa capaian kinerja telah memenuhi sekitar 96,1% dari target jangka menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa posisi kinerja saat ini berada pada jalur yang sesuai untuk mencapai target akhir, meskipun tetap memerlukan upaya peningkatan yang konsisten pada tahun-tahun berikutnya.

- ***Perbandingan Capaian Kinerja dengan Provinsi/Nasional***

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional yang berada pada kisaran 103–104 poin, NTPHP Kabupaten Bandung masih berada di bawah rata-rata nasional. Meskipun demikian, capaian di atas angka 100 menunjukkan bahwa kondisi usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Bandung tergolong sehat dan berkelanjutan, namun masih terdapat ruang peningkatan agar mampu mendekati atau melampaui capaian nasional.

- **Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Keberhasilan pencapaian NTPHP di atas target dipengaruhi oleh stabilitas harga produk olahan perikanan, ketersediaan bahan baku, serta dukungan pembinaan usaha pengolahan perikanan. Adapun perbedaan capaian dengan rata-rata nasional antara lain disebabkan oleh keterbatasan skala ekonomi dan produktivitas, tingkat inovasi produk dan pemanfaatan teknologi yang belum optimal, serta keterhubungan dengan rantai pasok dan pasar nasional yang masih terbatas. Sebagai alternatif solusi, telah dan perlu terus dilakukan penguatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi inovasi dan diversifikasi produk olahan, peningkatan efisiensi proses produksi, serta perluasan akses pasar melalui kemitraan dan integrasi rantai nilai.

- **Analisis terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, menunjukkan tingkat efisiensi rendah (di bawah 10%) dengan nilai kinerja anggaran berkisar 90–105%. Artinya, penyerapan anggaran relatif berjalan baik, namun hasil kinerja yang dicapai belum sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian kegiatan masih bersifat *input-oriented*, sehingga diperlukan reorientasi desain kegiatan menuju penciptaan nilai tambah, peningkatan akses pasar, dan dampak ekonomi langsung bagi pelaku usaha perikanan.

- **Analisis Dukungan Program/Kegiatan**

1. **Peningkatan produksi perikanan ikan olahan**

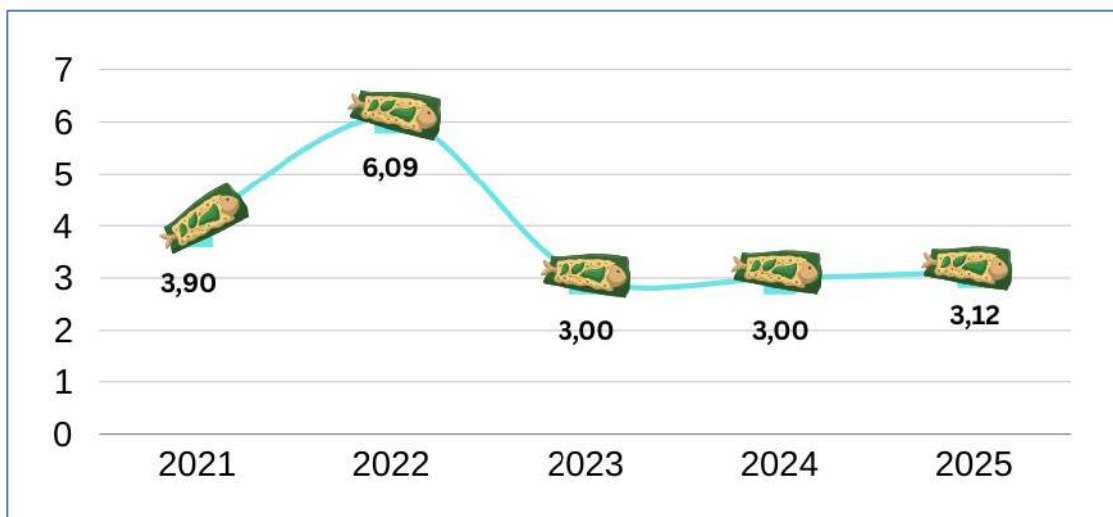
Target pertumbuhan produksi perikanan ikan olahan tahun 2025 sebesar 3%, tercapai 104% dari target. Pada tahun 2025, realisasi produksi ikan olahan perlu dibaca dalam konteks perubahan metode penghitungan. Target kinerja disusun dengan asumsi pendekatan yang lebih akurat dan berbasis data riil. Dengan diterapkannya metode baru yang hanya menghitung UPI aktif berproduksi, menggunakan realisasi *output* aktual, serta memperhitungkan susut produksi, capaian produksi yang terealisasi mencerminkan kondisi kinerja yang lebih faktual. Realisasi produksi ikan olahan tahun 2025 sebesar 10.059,98 ton. Meskipun secara capaian angka lebih

rendah dibandingkan metode lama, capaian tersebut menunjukkan tingkat ketercapaian target yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dibandingkan tahun 2024 dan tahun sebelumnya, realisasi produksi ikan olahan tahun 2025 mengalami penyesuaian angka akibat perubahan metodologi. Pada periode sebelumnya, perhitungan produksi masih mencakup seluruh UPI yang terdaftar secara administratif, menggunakan estimasi kapasitas dan produksi bruto, serta belum memperhitungkan susut produksi secara sistematis. Hal ini berpotensi menyebabkan over-estimasi capaian. Dengan metode baru, angka produksi tahun 2025 tampak lebih moderat, namun secara kualitas data lebih akurat dan konsisten, sehingga perbandingan antartahun ke depan menjadi lebih reliabel dan mencerminkan tren kinerja yang sesungguhnya

Tabel 3. 15. Realisasi Produksi Ikan Olahan 2021-2025

Kegiatan Perikanan	Hasil Produksi (Ton)					
	2021	2022	2023	2024		2025
				Metode Lama	Metode Baru	Metode Baru
Produksi Ikan Olahan	18.131	19.235	19.812	20.406	9.755	10.060



Gambar 6. Pertumbuhan Perikanan Ikan Olahan 2021-2025

Perubahan metodologi penghitungan menyebabkan perlunya penyesuaian *baseline* dan proyeksi target Renstra baru (2025-2029) agar selaras dengan pendekatan produksi bersih (*netto*) dan berbasis UPI aktif. Tanpa penyesuaian tersebut, capaian kinerja berisiko terlihat tidak optimal secara administratif, meskipun secara substansi telah mencerminkan kinerja yang lebih akuntabel.

Penyesuaian ini bukan merupakan kegagalan kinerja, melainkan koreksi metodologis untuk meningkatkan akurasi data. Alternatif solusi yang telah dan dapat dilakukan antara lain penyesuaian target tahunan, penguatan pendataan UPI aktif, serta sinkronisasi indikator kinerja dengan metode penghitungan terbaru.

Program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap capaian kinerja produksi ikan olahan antara lain:

- a. Verifikasi lapangan UPI aktif berproduksi;
- b. Pembinaan dan pendampingan teknis sentra pengolahan hasil perikanan;
- c. Pembersihan dan validasi data produksi;
- d. Penguatan sistem pelaporan produksi ikan olahan;
- e. Peningkatan koordinasi antara pengelola data, penyuluh, dan pelaku usaha.

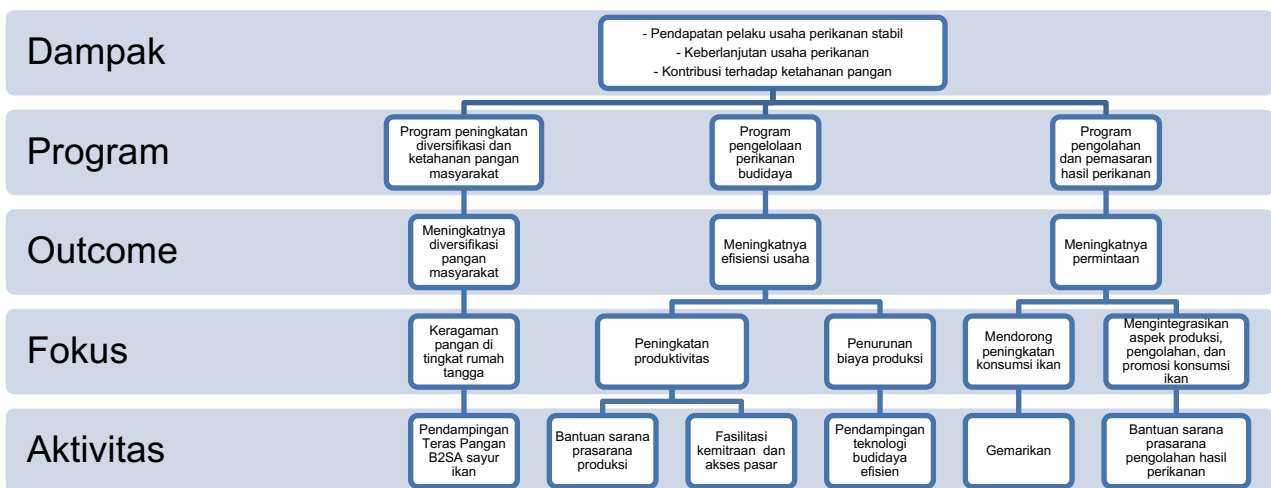
Program-program tersebut berperan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja, meskipun berdampak pada penurunan angka produksi secara nominal dibandingkan metode lama.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian NTPHP meliputi pembinaan dan pendampingan usaha pengolahan hasil perikanan, fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan, serta dukungan peningkatan mutu dan pemasaran produk. Namun demikian, keterbatasan dampak sebagian kegiatan masih dipengaruhi oleh skala intervensi yang relatif terbatas dan belum

optimalnya integrasi program dengan rantai pasok dan pasar nasional. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penajaman program yang lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing usaha pengolahan hasil perikanan.

Tabel 3. 16. Rekomendasi atas Kinerja Pengolahan Hasil Perikanan

Sasaran	Rekomendasi	Target
Meningkatkan Akurasi dan Cakupan Data NTPHP	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem pencatatan usaha digital (aplikasi sederhana). • Pelatihan pencatatan bagi pelaku usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% responden terdata rutin setiap semester.
Meningkatkan Produktivitas & Nilai Tambah	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan diversifikasi produk olahan sehat, kemasan menarik. • Pendampingan peningkatan efisiensi produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas rata-rata naik 10% dalam 2 tahun. • Minimal 3 produk baru dikembangkan.
Stabilisasi Harga & Pasokan Bahan Baku	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama dengan kelompok budidaya agar pasokan stabil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fluktuasi harga bahan baku berkurang. • Ketersediaan bahan baku stabil.
Penguatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha di Sentra Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan manajemen usaha, digital marketing, dan keuangan. • Sertifikasi kompetensi bagi pengolah ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • 70% pelaku usaha terlatih dalam manajemen dasar.



Gambar 7. Crosscutting Program Pendukung Capaian NTUP/NTPHP

A. 3. Dukungan Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

1. Nilai AKIP

Merujuk pada target Renstra baru (2025-2029), capaian tahun 2025 nilai AKIP sebesar 82,30 telah mendekati target akhir Renstra, yakni 83,30. Selisih 1,00 poin dari target akhir, secara progres, menggambarkan tren peningkatan yang positif dan realistis. Sasaran objek perbaikan AKIP diharapkan fokus pada penguatan kualitas, bukan lagi pada pembangunan sistem dasar.

Tabel 3. 17. Capaian Nilai AKIP 2021-2025

Komponen Penilaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Perencanaan Kinerja (30%)	27,74	27,00	27,00	26,10	25,50
Pengukuran Kinerja (30%)	20,63	25,20	24,00	26,10	22,80
Pelaporan Kinerja (15%)	12,13	12,00	11,10	11,70	12,75
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	5,73	18,50	20,75	19,00	21,25
Pencapaian Sasaran Kinerja	16,09				
Total	82,31	82,70	82,85	82,90	82,30
	A	A	A	A	A

Faktor-faktor yang mendukung capaian Nilai AKIP, antara lain:

- Komitmen pimpinan terhadap penguatan akuntabilitas kinerja, termasuk dalam pengendalian dan evaluasi program;
- Sinergi lintas unit kerja dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja;
- Dukungan sistem informasi kinerja mempermudah pemantauan dan pelaporan capaian kinerja.

Adapun faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi capaian AKIP meliputi:

- Perubahan kebijakan dan dinamika program prioritas, yang memerlukan penyesuaian indikator kinerja secara cepat;
- Belum optimalnya budaya kinerja berbasis hasil (*result-oriented culture*).

Tingkat efisiensi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 5,04%, secara keseluruhan, penggunaan sumber daya pada program tersebut dapat dikategorikan cukup efektif dari sisi penyerapan anggaran,

namun belum sepenuhnya efisien dari perspektif *value for money*. Diperlukan penajaman prioritas kegiatan penunjang yang memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kinerja utama, pengurangan aktivitas rutin yang bernilai tambah rendah, serta penguatan pengukuran kontribusi program penunjang terhadap *outcome* strategis perangkat daerah.

Kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan nilai AKIP, diarahkan pada:

1. Optimalisasi implementasi pengukuran dan pelaporan kinerja, dengan memastikan ketersediaan data dukung yang valid, tepat waktu, dan konsisten antar dokumen perencanaan dan pelaporan melalui aplikasi SIDALMONEP dan SIMWAS;
2. Optimalisasi evaluasi internal, melalui desk reviu triwulanan atas capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan terhadap hasil yang diharapkan.

Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya mendorong peningkatan nilai AKIP secara administratif, tetapi juga memperkuat akuntabilitas substantif, yaitu ketercapaian hasil pembangunan ketahanan pangan dan perikanan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

2. Nilai IKM

Capaian IKM sebesar 85,10 telah melampaui target Renstra lama (2021–2026) yang ditetapkan sebesar 84,82. Selisih positif sebesar 0,28 poin ini menunjukkan bahwa upaya tindak lanjut perbaikan kualitas layanan telah berdampak nyata terhadap peningkatan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Tabel 3. 18. Capaian Nilai IKM 2021-2025

Produk Pelayanan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Standar Pelayanan Penjualan Benih Ikan UPTD BBI	80,43	78,45	85,06	77,29	78,41
Konsultasi Perikanan, Magang, PKI dan Prakerin	84,81	84,94	82,11	84,20	85,23
Standar Pelayanan Konsultasi dan Perijinan PSAT – PDUK	-	-	89,10	89,09	90,40
Pelayanan Fasilitasi Legalitas Usaha Perikanan	-	-	82,73	90,86	90,64
Rata-Rata	82,26	81,12	84,66	83,57	85,10

Namun demikian, nilai IKM DISPAKAN berada di bawah nilai IKM Pemda Kabupaten Bandung (89,01). Layanan DISPAKAN yang bersifat teknis

cenderung memiliki tantangan operasional yang lebih tinggi dibandingkan layanan administratif umum, sehingga berpengaruh terhadap persepsi kepuasan masyarakat. Selisih sebesar 3,91 poin merupakan ruang perbaikan untuk DISPAKAN agar dapat berkontribusi lebih optimal terhadap capaian kepuasan layanan publik di tingkat pemerintah daerah secara keseluruhan.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian nilai IKM meliputi:

- Komitmen pimpinan dan aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan;
- Standarisasi pelayanan yang semakin jelas, termasuk pembaharuan SOP layanan;
- Dukungan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.

Meskipun capaian telah melampaui target, masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat peningkatan kinerja layanan, antara lain:

- Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pelayanan;
- Variasi kualitas pelayanan antar unit atau jenis layanan, yang memengaruhi persepsi kepuasan secara agregat;
- Belum optimalnya literasi masyarakat terhadap prosedur dan standar layanan, yang dapat memicu persepsi ketidaksesuaian layanan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator IKM ini diambil dari unit layanan yang masuk ke dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang hasilnya tercermin dalam nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP), yaitu layanan dari UPTD BBI. Tingkat efisiensi tercatat sebesar 2,21%, yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya relatif terkendali dan masih berada dalam batas kewajaran pembiayaan untuk pencapaian *output* yang ditargetkan. Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya pada kegiatan ini dapat dikategorikan efisien dan efektif, terutama dari sisi pencapaian *output* dan dukungan terhadap sasaran program. Ke depan, peningkatan efisiensi dapat diarahkan pada penguatan perencanaan kebutuhan sarana secara lebih presisi, optimalisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan, serta penguatan monitoring pemanfaatan sarana agar manfaat yang dihasilkan semakin sebanding dengan sumber daya yang digunakan.

Program/kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan nilai IKM diarahkan pada pelayanan yang mendekatkan pemerintah kepada masyarakat serta yang memperkuat fungsi pendampingan, antara lain:

1. Pembinaan penerapan Cara Pembenihan dan Budidaya Ikan yang Baik (CP/CBIB) berkontribusi pada meningkatnya pemahaman dan kepercayaan pelaku usaha terhadap layanan teknis pemerintah;
2. Pos Pelayanan Perikanan Terpadu (POSKANDU) mempercepat akses layanan dan konsultasi, sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan secara lebih mudah dan terintegrasi;
3. Kegiatan Duri Ikan (Duduk Berbincang Ringan Bersama Pembudi Daya Ikan) dan *Ngawangkong* di Balong menjadi bentuk inovasi layanan berbasis dialog langsung, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media penyerapan aspirasi dan penyelesaian permasalahan lapangan, seperti kendala budi daya, fluktuasi harga pakan, distribusi hasil panen, hingga pendampingan perizinan usaha dan kepemilikan Kartu KUSUKA.;
4. Dari Urusan Pangan, pengawasan keamanan pangan melalui layanan konsultasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) memperkuat aspek kepastian mutu pangan, yang berdampak langsung pada rasa aman.

Untuk menjaga keberlanjutan peningkatan nilai IKM, DISPAKAN telah dan terus melakukan berbagai upaya, antara lain:

- Perbaikan dan penyederhanaan alur pelayanan, serta peningkatan kepastian waktu layanan;
- Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan, melalui penguatan budaya melayani;
- Peningkatan transparansi informasi layanan, termasuk persyaratan, biaya, dan standar pelayanan.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dialokasikan anggaran sebesar Rp41.655.275.958 dengan realisasi sebesar Rp39.323.939.444 atau 94,40%.

Tabel 3. 19. Realisasi Anggaran Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Operasi	39.420.978.410,00	37.187.477.096,00
Belanja Pegawai	11.436.514.663,00	10.250.197.439,00
Belanja Barang dan Jasa	24.277.876.147,00	23.769.977.332,00
Belanja Hibah	3.206.587.600,00	3.167.302.325,00
Belanja Modal	2.234.297.548,00	2.136.462.348,00
Belanja Peralatan dan Mesin	1.360.494.148,00	1.268.689.448,00
Belanja Gedung dan Bangunan	873.803.400,00	867.772.900,00
JUMLAH	41.655.275.958,00	39.323.939.444,00

Menindaklanjuti Instruksi Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025, DISPAKAN melalui unit kerja eselon III (Bidang), melakukan blokir anggaran (*self-blocking*) sebesar Rp.1.007.962.775,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 20. Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Organisasi Eselon III (Bidang)

Unit Eselon III (Bidang)	ANGGARAN	REALISASI	SELF BLOCKING
Sekretariat	15.972.174.393,00	14.585.681.647,00	111.779.587,00
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	11.339.023.215,00	11.266.804.004,00	47.394.456,00
Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan	4.225.271.800,00	3.850.920.182,00	368.753.700,00
Bidang Perikanan Budi Daya	8.355.097.000,00	7.929.387.168,00	409.106.862,00
Bidang Usaha Perikanan	1.763.709.550,00	1.691.146.443,00	70.928.170,00
JUMLAH	41.655.275.958,00	39.323.939.444,00	1.007.962.775,00

Untuk uraian lebih rinci mengenai realisasi anggaran dan kinerja program kegiatan urusan ketahanan pangan serta urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 21. Realisasi Anggaran dan Kinerja Urusan 2025

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian
				K	RP	K	RP	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Poin	83,25	15,972,174,393.00	82,3	14,585,681,647.00	91.32
		Nilai IKM	Poin	84,72		85,1		
2.09.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100.00	93,534,796.00	100.00	90,159,318.00	96.39
2.09.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4.00	62,284,611.00	5.00	61,459,100.00	98.67
2.09.01 .2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4.00	6,450,000.00	4.00	6,201,218.00	96.14
2.09.01 .2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	6.00	5,000,000.00	6.00	4,998,000.00	99.96
2.09.01 .2.01.0 008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	dokumen	1.00	4,848,885.00	1.00	2,805,000.00	57.85
2.09.01 .2.01.0 009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	data	91.00	14,951,300.00	124.00	14,696,000.00	98.29
2.09.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100.00	11,456,558,390.00	100.00	10,270,655,139.00	89.65

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian
				K	RP	K	RP	
2.09.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	45.00	11,427,773,090.00	46.00	10,242,722,439.00	89.63
2.09.01 .2.02.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1.00	2,000,000.00	1.00	1,997,400.00	99.87
2.09.01 .2.02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12.00	26,785,300.00	12.00	25,935,300.00	96.83
2.09.01 .2.05 002	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penunjang kerja aparatur	persen	100.00	155,094,100.00	100.00	139,897,000.00	90.20
2.09.01 .2.05.0 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	2.00	129,893,400.00	2.00	114,702,000.00	88.30
2.09.01 .2.05.0 005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	12.00	25,200,700.00	12.00	25,195,000.00	99.98
2.09.01 .2.06 001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran	persen	100.00	868,570,034.00	100.00	822,692,435.00	94.72
2.09.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1.00	20,000,000.00	1.00	19,989,102.00	99.95
2.09.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2.00	469,013,800.00	2.00	426,974,222.00	91.04
2.09.01 .2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2.00	52,871,118.00	2.00	51,772,065.00	97.92

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian
				K	RP	K	RP	
2.09.01 .2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1.00	47,000,000.00	1.00	46,988,019.00	99.97
2.09.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2.00	119,442,300.00	2.00	118,959,018.00	99.60
2.09.01 .2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1.00	17,500,000.00	1.00	17,460,000.00	99.77
2.09.01 .2.06.0 007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	2.00	11,840,000.00	2.00	11,830,500.00	99.92
2.09.01 .2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12.00	5,855,000.00	12.00	4,175,000.00	71.31
2.09.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	116.00	125,047,816.00	119.00	124,544,509.00	99.60
2.09.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	persen	100.00	424,796,800.00	100.00	385,560,200.00	90.76
2.09.01 .2.07.0 002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1.00	36,538,000.00	0.00	0	0.00
2.09.01 .2.07.0 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	1.00	138,258,800.00	1.00	136,940,700.00	99.05
2.09.01 .2.07.0 009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1.00	250,000,000.00	1.00	248,619,500.00	99.45

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian
				K	RP	K	RP	
2.09.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran	persen	100.00	2,028,773,500.00	100.00	1,954,438,855.00	96.34
2.09.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12.00	260,000,000.00	12.00	203,492,719.00	78.27
2.09.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12.00	1,768,773,500.00	12.00	1,750,946,136.00	98.99
2.09.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran	persen	100.00	936,105,200.00	100.00	914,803,700.00	97.72
2.09.01 .2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	36.00	271,588,000.00	36.00	256,158,977.00	94.32
2.09.01 .2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	20.00	40,000,000.00	22.00	39,491,323.00	98.73
2.09.01 .2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3.00	624,517,200.00	3.00	619,153,400.00	99.14
2.09.01 .2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	persen	100.00	8,741,573.00	100.00	7,475,000.00	85.51
2.09.01 .2.11.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/ bul an	2.00	8,741,573.00	2.00	7,475,000.00	85.51
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase desa rentan pangan yang memiliki Lumbung Pangan	persen	20.00	290,406,000.00	20.00	261,507,700.00	90.05

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian
				K	RP	K	RP	
2.09.02 .2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lumbung pangan yang beroperasi baik	unit	57.00	290,406,000.00	33.00	261,507,700.00	90.05
2.09.02 .2.01.0 004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	laporan	4.00	290,406,000.00	4.00	261,507,700.00	90.05
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE)	persen	100.00	13,442,043,615.00	111,2	13,115,445,596.00	97.57
2.09.03 .2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase simpul pangan di desa yang aktif	persen	91.00	1,971,326,100.00	50.00	1,874,533,350.00	95.09
2.09.03 .2.01.0 003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	12.00	15,133,400.00	12.00	5,527,000.00	36.52
2.09.03 .2.01.0 007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	930.00	317,630,000.00	990.00	306,651,450.00	96.54
2.09.03 .2.01.0 008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	10.00	809,404,400.00	106.00	808,818,200.00	99.93
2.09.03 .2.01.0 009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	laporan	10.00	345,098,400.00	10.00	330,655,300.00	95.81
2.09.03 .2.01.0 010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	unit	10.00	426,420,500.00	10.00	410,897,700.00	96.36

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian
				K	RP	K	RP	
2.09.03 .2.01.0 015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	dokumen	12.00	32,360,000.00	9.00	9,582,500.00	29.61
2.09.03 .2.01.0 016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	1.00	25,279,400.00	1.00	2,401,200.00	9.50
2.09.03 .2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan	persen	25.00	10,628,030,815.00	36,65	10,627,075,764.00	99.99
2.09.03 .2.02.0 002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	dokumen	1.00	76,760,100.00	1.00	76,652,500.00	99.86
2.09.03 .2.02.0 003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	295.00	10,551,270,715.00	524.47	10,550,423,264.00	99.99
2.09.03 .2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan Wilayah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	persen	100.00	842,686,700.00	100.00	613,836,482.00	72.84
2.09.03 .2.04.0 001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen	1.00	24,081,800.00	1.00	23,734,000.00	98.56
2.09.03 .2.04.0 002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	2.00	109,672,900.00	2.00	84,558,412.00	77.10
2.09.03 .2.04.0 003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	laporan	1.00	708,932,000.00	1.00	505,544,070.00	71.31
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase pelaksanaan penanganan desa rentan rawan pangan	persen	100.00	420,586,400.00	100.00	378,220,540.00	89.93

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian
				K	RP	K	RP	
2.09.04 .2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	persen	100.00	279,468,500.00	100.00	279,362,300.00	99.96
2.09.04 .2.01.0 001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	dokumen	13.00	279,468,500.00	13.00	279,362,300.00	99.96
2.09.04 .2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase KK miskin yang tertangani	persen	20.00	141,117,900.00	100.00	98,858,240.00	99.37
2.09.04 .2.02.0 002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan	4.00	50,450,000.00	4.00	50,131,900.00	53.74
2.09.04 .2.02.0 003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	laporan	1.00	90,667,900.00	1.00	48,726,340.00	53.74
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	1,411,259,000.00	109,3	1,362,550,350.00	96.55
2.09.05 .2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang mendapatkan sertifikasi Prima dan Rekomendasi Registrasi PSAT dan Packing House (kumulatif)	rekomendasi	31.00	1,411,259,000.00	52.00	1,362,550,350.00	96.55
2.09.05 .2.01.0 006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	dokumen	1.00	21,772,200.00	1.00	17,153,800.00	78.79
2.09.05 .2.01.0 007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	dokumen	1.00	1,302,686,000.00	1.00	1,279,691,050.00	98.23

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian
				K	RP	K	RP	
2.09.05 .2.01.0 009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	dokumen	1.00	86,800,800.00	1.00	65,705,500.00	75.70
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Capaian Produksi perikanan tangkap	persen	100.00		104,69		
3.25.03 .2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perairan umum yang ditebar ikan	persen	11.00		14.00		
3.25.03 .2.01.0 004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	unit	1.00	237,720,000.00	1.00	236,386,260.00	99.44
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Capaian Produksi perikanan budidaya	persen	100.00	8,417,217,500.00	105.00	7,988,708,118.00	94.91
3.25.04 .2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha (kumulatif)	persen	100.00	62,120,500.00	186.00	59,320,950.00	95.49
3.25.04 .2.01.0 002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan	rekomendasi	20.00	62,120,500.00	112.00	59,320,950.00	95.49

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian
				K	RP	K	RP	
	Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing							
3.25.04 .2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan bina kelompok perikanan	kelompok	150.00	4,916,123,000.00	284.00	4,768,267,460.00	96.99
3.25.04 .2.02.0 001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	kelompok	166.00	3,652,988,500.00	166.00	3,625,824,100.00	99.26
3.25.04 .2.02.0 002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	kelompok	20.00	161,248,800.00	28.00	129,243,200.00	80.15
3.25.04 .2.02.0 004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	kelompok	90.00	1,101,885,700.00	90.00	1,013,200,160.00	91.95
3.25.04 .2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi ikan budidaya	ton	17,029.00	3,438,974,000.00	17,834.00	3,161,119,708.00	91.92
3.25.04 .2.04.0 001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	12.00	127,817,000.00	12.00	52,184,250.00	40.83
3.25.04 .2.04.0 002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	38.00	2,507,303,000.00	39.00	2,475,331,950.00	98.72
3.25.04 .2.04.0 004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	dokumen	1.00	135,424,600.00	1.00	107,415,508.00	79.32

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian
				K	RP	K	RP	
3.25.04 .2.04.0 003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1.00	454,542,000.00	1.00	444,477,500.00	97.79
3.25.04 .2.04.0 005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	unit	30.00	74,408,000.00	75.00	59,519,900.00	79.99
3.25.04 .2.04.0 011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Unit	1.00	139,479,400.00	1 unit	22,190,600.00	15.91
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	persen	100.00	123,038,700.00	100.00	64,581,000.00	52.49
3.25.05 .2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang dibina	kelompok	13.00	123,038,700.00	13.00	64,581,000.00	52.49
3.25.05 .2.01.0 004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	pelaku usaha	20.00	64,584,700.00	20.00	14,584,200.00	22.58
3.25.05 .2.01.0 006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	pelaku usaha	5.00	9,450,000.00	13.00	9,449,600.00	100.00
3.25.05 .2.01.0 009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	kelompok	14.00	49,004,000.00	14.00	40,547,200.00	82.74

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian
				K	RP	K	RP	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase capaian produksi hasil olahan perikanan	persen	100.00	1,340,830,350.00	100,03	1,330,858,233.00	99.26
3.25.06 .2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah NIB pengolahan hasil perikanan diterbitkan	NIB	5.00	79,450,300.00	11.00	75,772,000.00	95.37
3.25.06 .2.01.0 005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	dokumen	1.00	79,450,300.00	1.00	75,772,000.00	95.37
3.25.06 .2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk perikanan yang memiliki sertifikasi SKP (kumulatif) (Produk)	produk	25.00	81,855,900.00	10.00	80,095,700.00	99.62
3.25.06 .2.02.0 002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	unit usaha	20.00	81,855,900.00	23.00	80,095,700.00	97.85
3.25.06 .2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan	ton	21,487.00	1,179,524,150.00	10,060.00	1,174,990,533.00	99.62
3.25.06 .2.03.0 001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ton	1.00	610,036,750.00	1.00	607,837,828.00	99.64

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian
				K	RP	K	RP	
3.25.06 .2.03.0 002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	pelaku usaha	23.00	569,487,400.00	23.00	567,152,705.00	99.59



BAB IV PENUTUP



A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dan melampaui target pada indikator utama. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi terealisasi sebesar 95,78 atau 111,87% dari target, yang mengindikasikan perbaikan kualitas dan keberagaman pola konsumsi pangan masyarakat. Sementara itu, Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) mencapai 120,90 atau 120,90% dari target, yang mencerminkan kondisi usaha perikanan yang relatif menguntungkan dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi fluktuasi biaya produksi.

Capaian tersebut didukung oleh tingkat penyerapan anggaran yang relatif tinggi pada seluruh urusan, yaitu 91,32% pada urusan wajib/rutin, 97,13% pada urusan ketahanan pangan, dan 95,08% pada urusan kelautan dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan cukup efektif dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

B. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sebagai berikut.

Aspek Ketahanan Pangan:

1. Preferensi masyarakat terhadap beras, sayur dan buah masih menjadi kendala dalam mewujudkan komposisi konsumsi pangan yang lebih beragam dan seimbang karena dipengaruhi faktor budaya, daya beli dan harga.
2. Ketergantungan terhadap program intervensi pemerintah dalam menjaga Skor PPH dan akses pangan kelompok rentan.
3. Target indikator yang belum sepenuhnya proporsional dengan kapasitas pelaksanaan, sehingga menimbulkan capaian yang terlalu rendah atau tinggi secara persentase.

Aspek Perikanan:

1. Fluktuasi kualitas dan kuantitas sumber daya air, terutama pada musim kemarau.
2. Kualitas benih dan risiko penyakit ikan yang berdampak pada produktivitas.
3. Tingginya harga pakan dan keterbatasan pakan alternatif.
4. Fluktuasi harga jual ikan dan produk olahan yang dipengaruhi faktor musiman dan pasar.

Aspek Tata Kelola:

Penurunan nilai AKIP dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan perlunya penguatan konsistensi pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring kinerja belum sepenuhnya optimal sebagai dasar perbaikan program.

Upaya perbaikan serta rencana tindak lanjut yang dilakukan meliputi:

- a. Penguatan Ketahanan dan Diversifikasi Pangan
 1. Mendorong diversifikasi pangan berbasis pangan lokal melalui inovasi produk olahan dan edukasi konsumsi pangan bergizi.
 2. Penguatan CPPD secara lebih terencana dan berkelanjutan dengan penajaman target tahunan berbasis kebutuhan riil.
 3. Integrasi intervensi ketahanan pangan dengan program penanganan stunting dan pengendalian inflasi daerah.
- b. Peningkatan Kinerja Sektor Perikanan
 1. Peningkatan kualitas benih dan pengendalian penyakit ikan melalui penguatan peran UPTD pembenihan.
 2. Pengembangan pakan alternatif dan efisiensi biaya produksi.

3. Penguatan hilirisasi, pengolahan, dan pemasaran produk perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
- c. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas
1. Penyempurnaan indikator kinerja agar lebih *outcome-oriented* dan selaras dengan Renstra 2025–2029.
 2. Optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja secara triwulanan sebagai dasar perbaikan kebijakan.
 3. Peningkatan pemanfaatan data kinerja dan hasil SKM sebagai input utama dalam peningkatan kualitas layanan publik.

C. Kondisi yang Diharapkan

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi serta rencana tindak lanjut yang telah dirumuskan, kondisi yang diharapkan pada periode pelaksanaan program selanjutnya adalah terwujudnya peningkatan kinerja pembangunan sektor ketahanan pangan, perikanan, dan tata kelola perangkat daerah yang lebih efektif, berkelanjutan, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Pada aspek ketahanan pangan, kondisi yang diharapkan adalah meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat yang tidak lagi didominasi oleh satu jenis pangan pokok, melainkan didukung oleh konsumsi pangan lokal yang lebih beragam, bergizi, dan seimbang. Hal ini diharapkan dapat tercermin dari perbaikan komposisi konsumsi pangan masyarakat serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola konsumsi sehat dan beragam. Di sisi lain, program intervensi pemerintah diharapkan semakin berfungsi sebagai stimulus dan penguatan sistem pangan, bukan sebagai ketergantungan jangka panjang, sehingga akses pangan bagi kelompok rentan dapat terjaga melalui mekanisme ekonomi dan sosial yang lebih mandiri. Selain itu, penyempurnaan penetapan indikator kinerja diharapkan menghasilkan target yang lebih proporsional dan realistis, sehingga capaian kinerja dapat mencerminkan kondisi pembangunan yang lebih akurat dan terukur.

Pada aspek perikanan, kondisi yang diharapkan adalah meningkatnya stabilitas dan produktivitas usaha perikanan melalui pengelolaan sumber daya yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan, khususnya fluktuasi ketersediaan air pada musim kemarau. Peningkatan kualitas benih serta penguatan sistem pengendalian penyakit ikan diharapkan mampu

meningkatkan tingkat kelangsungan hidup dan produktivitas budidaya. Selain itu, pengembangan pakan alternatif dan efisiensi biaya produksi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pakan komersial yang harganya fluktuatif. Pada sisi hilir, penguatan pengolahan dan pemasaran produk perikanan diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas akses pasar, serta menjaga stabilitas harga produk perikanan di tingkat pembudidaya dan pelaku usaha.

Pada aspek tata kelola, kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui penguatan sistem perencanaan, pengukuran, serta evaluasi kinerja yang lebih konsisten dan berbasis data. Optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala diharapkan mampu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selain itu, pemanfaatan data kinerja, hasil evaluasi, serta survei kepuasan masyarakat secara lebih sistematis diharapkan dapat menjadi dasar utama dalam perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

